

**PERAN DISPENDA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH DI BANDAR LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI
ISLAM (2013-2016)**



Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E)**

Oleh

Aditya Syaiful Rachman

NPM : 1351010130

Jurusan : Ekonomi Syariah

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1438/2017 M

ABSTRAK

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah. Salah satu PAD diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat salah satunya adalah pajak daerah.

Adapun Rumusan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini bagaimana Peran Dinas Pendapatan Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandar Lampung yang ditinjau dalam perspektif Ekonomi Islam karena masih adanya wajib pajak yang melakukan manipulasi kecurangan, petugas penagihan tidak jujur, sampai permainan antara petugas penagih pajak dan wajib pajak, keberadaan data objek dan subjek pajak yang belum lengkap dan belum akurat serta penerimaan yang belum optimal karena target dari penerimaan pajak daerah dan pendapatan asli daerah di Kota Bandar Lampung belum terealisasi dengan baik, belum mencapai target yang sudah ditetapkan. Tujuan Masalah untuk mengetahui peran Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan pendapatan daerah dan mengetahui peran Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan pendapatan daerah dalam perspektif Ekonomi Islam.

Dalam penelitian ini tentunya memerlukan wawancara (interview) yang bertujuan memperoleh informasi pada penelitian ini wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan tanya jawab yang bersifat bebas (berbincang-bincang) dengan Kepala bidang pajak daerah di Dispenda. Pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode studi pustaka, wawancara, dan dokumentasi. Sementara data-data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*), penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku di lapangan, dimana peneliti mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena atau kejadian keadaan yang alamiah bagaimana peran Dinas Pendapatan Daerah kota Bandar Lampung dalam meningkatkan pendapatan daerah ditinjau dari perspektif ekonomi Islam.

Target penerimaan pajak daerah dan Pendapatan Asli daerah tidak pernah terealisasi dari tahun 2013-2016, peran Dinas Pendapatan Asli Daerah dalam menyadarkan wajib pajak seperti yang telah disebutkan diatas, upaya-upaya yang telah ditetapkan belum terlaksana dengan baik karena target belum terealisasi. Peran dispenda dalam meningkatkan PAD ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam belum menggunakan prinsip Islam. Karena masih ditemukan ketidak jujuran petugas pemungut pajak dan juga wajib pajak. Tanggung jawab dispenda seharusnya bisa merealisasikan target yang telah ditetapkan. Keadilan yang masih kurang karena seharusnya Dinas Pendapatan Asli Daerah harus bersikap tegas dan memberikan sanksi kepada mereka yang tidak jujur dalam pemungutan pajak.



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : PERAN DISPENDA DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI BANDAR LAMPUNG
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (2013-2016)**

Nama : Aditya Syaiful Rachman

Npm : 1351010130

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.**

Pembimbing I

H. Supaijo, S.H., M.H
NIP. 196503121994031002

Pembimbing II

M. Kurniawan, S.E., M.E.Sy
NIP. 198605172015031005

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi Islam

Madnasir, S.E., M.S.I
NIP. 197504242002121001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : PERAN DISPENDA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI BANDAR LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (2013-2016), disusun oleh: Aditya Syaiful Rachman, NPM : 1351010130, Program Studi: Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/tanggal: Jum'at / 10 November 2017

DEWAN PENGUJI

Ketua : Any Eliza, M.Ak.

Sekretaris : Yulistia Devi, M.S.Ak

Penguji I : Erike Anggraini, D.B.A.

Penguji II : H. Supaijo, S.H., M.H

DEKAN
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Moh. Bahrudin., M.A
NIP. 195805241989031003

MOTTO

مَنْ جَدَّ وَ جَدَّ

Artinya : “Barang Siapa Yang Bersungguh-Sungguh, Maka Pasti Akan Mendapat”





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat. Jl. Let.kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung 35131 0721-703260

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Aditya Syaiful Rachman**

NPM : **1351010130**

Program Studi : **Ekonomi Syariah**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Peran Dispenda Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Bandar Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam (2013-2016)”** adalah benar-benar merupakan skripsi hasil karya penyusunan sendiri, bukan dipublikasikan ataupun dari saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 04 September 2017

Penyusun

Aditya Syaiful Rachman
NPM. 1351010130

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah karya sederhana ini di persembahkan kepada Allah SWT sembah sujud saya atas hadirat-Nya dan limpahan karunia-Nya yang selalu diberikan untuk saya dan puji syukur kepada baginda nabi Muhammad SAW.

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Dani Sulistyna S.E dan ibu Yantini Puji Hastuti yang telah memberikan kasih sayang yang tidak terbatas serta telah ikhlas mendidik, memberikan motivasi dan senantiasa mendoakan, terimakasih atas semua pengorbanan baik materi maupun non materi yang telah diberikan, dan memberikan support yang tiada hentinya serta mendoakan saya agar selalu ada dalam jalan-Nya. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT dan keberkahan dalam setiap langkahnya.
2. Adik saya Rifqi Syaiful Irsyad yang senantiasa selalu memberi semangat dan mendoakan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Sahabat-sahabatku yang tidak dapat disebutkan satu per satu dan semua angkatan 2013, ekonomi islam kelas A kalian yang selalu memberikan dukungan serta semangat sampai terselesaikannya skripsi ini.
4. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, semoga selalu jaya, maju dan berkualitas.

RIWAYAT HIDUP

Pada 21 tahun yang lalu, Penulis dianugerahi nama oleh kedua orang tua yang bernama **Aditya Syaiful Rachman**, dilahirkan di Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Pulau Sumatera, pada tanggal 4 September 1995, anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Ayah Bernama **Dani Sulistyana S.E** dan Ibu bernama **Yanitini Puji Hastuti S.E**

Riwayat pendidikan penulis yang telah diselesaikan adalah :

1. TK ISLAM Darul Hikmah 1999-2000
2. SD Kartika II-5 (Persit) Kota Bandar Lampung 2001-2006
3. SMP Muhammadiyah 3 Kota Bandar Lampung 2007-2010
4. SMA YP Unila Kota Bandar Lampung 2010--2013
5. Setelah menyelesaikan Sekolahnya, Pada tahun 2013 penulis melanjutkan pendidikannya di bangku perkuliahan melalui seleksi Ujian Masuk Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (UMPTAIN) yang sekarang berubah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam dan mengambil jurusan Ekonomi Islam

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, serta kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan lancar. Penulisan skripsi dengan judul “Peran Dispenda Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Bandar Lampung 2013-2016” dapat diselesaikan. Shalawat serta salam penulis sanjungkan agungkan kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat serta para pengikut-pengikut yang setia.

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan studi (pendidikan) program strata satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam dalam bidang ilmu Ekonomi. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan dan kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala tersebut dapat diatasi. Oleh karena itu, dengan tulus dan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

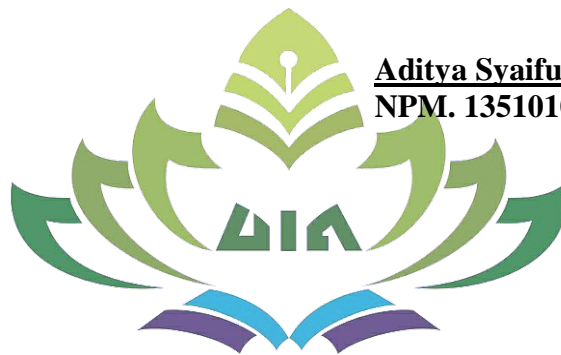
1. Dr. Moh. Bahrudin, M.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan mahasiswa dan selalu memberikan dukungan kepada setiap mahasiswa.
2. Madnasir, S.E., M.Si selaku ketua jurusan Ekonomi Islam yang senantiasa sabar dalam memberikan arahan serta motivasi dan suport kepada penulis hingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

3. H. Supaijo, S.H., M.H selaku dosen pembimbing I dan M. Kurniawan, S.E., M.E.Sy, selaku dosen pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu serta pikiran dalam membimbing, mengarahkan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu serta motivasi yang bermanfaat kepada penulis hingga dapat menyelesaikan studi.
5. Pimpinan dan karyawan perpustakaan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung dan Perpustakaan Daerah Bandar Lampung dan Institut yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
6. Kepala Bidang Pajak Daerah, Dinas Pendapatan Asli Daerah bpk. Ir Idul Haji Atmoko Kota Bandar Lampung yang telah membantu penulis dalam mendapatkan data-data penelitian serta memberikan pemaparan mengenai data-data yang telah diberikan tersebut.
7. Sahabat-sahabat seperjuangan khususnya Jurusan Ekonomi Islam kelas A angkatan tahun 2013 yang tidak bisa disebutkan satu persatu serta rekan-rekan mahasiswa yang ikut membantu penyelesaian skripsi ini

Semoga penulisan ini menjadi kontribusi dalam Ilmu Pengetahuan khususnya dalam bidang Ekonomi Islam dan Semoga Allah SWT senantiasa membalas jasa dan kebaikan pada semua pihak yang telah membantu serta mendoakan hingga terselesaikannya skripsi ini. Amin Ya Robbal' alamin.

Bandar Lampung, 17 Agustus 2017

Penulis,



Aditya Syaiful Rachman
NPM. 1351010130

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah	5
D. Batasan Masalah.....	18
E. Rumusan Masalah.....	18
F. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	18
G. Metode Penelitian	19

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Peran	24
1. Pengertian Peran	24
2. Peran Pemerintah	26
3. Peran Pemerintah Dalam Pandangan Ekonomi Islam	27

B. Konsep Otonomi daerah	28
1. Pengertian Otonomi Daerah.....	28
2. Tujuan Otonomi Daerah	29
3. Indikator Otonomi Daerah	30
C. Konsep Pendapatan Asli Daerah.....	33
1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	33
2. Sumber Pendapatan Asli Daerah.....	35
a. Pajak Daerah.....	36
b. Retribusi Daerah.....	39
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan.....	42
d. Pendapatan Lain-Lain Yang Sah.....	43
3. Pendapatan Asli Daerah Dalam Perspektif Ekonomi Islam	43
D. Konsep Pajak daerah.....	50
1. Pengertian Pajak Daerah	50
2. Jenis Pajak & Objek Pajak.....	51
3. Penerapan Tarif Pajak	52
4. Tata Cara Pemungutan Pajak.....	54
5. Kadaluarsa Penagihan Pajak	55
6. Sanksi Administrasi	56
7. Sanksi Pidana.....	58
E. Pajak Dalam Pandangan Ekonomi Islam.....	58
1. Pajak Dalam Perspektif Ekonomi Islam	58
2. Prinsip Pendapatan & Pengeluaran Dalam Perspektif Islam.....	60

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung	61
1. Sejarah Berdirinya Dispenda Kota Bandar Lampung.....	61
2. Visi & Misi Dispenda Kota Bandar Lampung.....	62
3. Struktur Organisasi Dispenda	63
4. Fungsi & Tugas Dispenda Kota Bandar Lampung	64
B. Pajak Daerah Sebagai Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung	67

BAB IV ANALISIS DATA

- A. Peran Dispenda Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung 71
- B. Peran Dispenda Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam.....111

BAB V KESIMPULAN & SARAN

- A. Kesimpulan 117
- B. Saran 118

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Daftar Tabel	Halaman
Tabel 1.1 Target & Realisasi Penerimaan Pajak Kota Bandar Lampung	16
Tabel 1.2 Target & Realisasi Penerimaan Pajak Kota Bandar Lampung	67
Tabel 2.1 Target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung	75
Tabel 2.2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2013-2016.....	76
Table 3.1 Persentase Kontribusi Pendapatan Pajak Daaerah Terhadap PAD.....	76
Tabel 3.2 Target dan Realisasi PAD Banadar Lampung.....	77



DAFTAR GAMBAR

Daftar Gambar	Halaman
Tabel 1.1 Surat Kabar Mengenai Pajak dan Sosialisasi Tentang Pajak Daerah	91
Tabel 1.2 Surat Kabar Mengenai Pajak dan Sosialisasi Tentang Pajak Daerah.....	108
Tabel 2.1 Tingkat Angka Kemiskinan Provinsi Lampung dan Nasional	116
Tabel 2.2 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Lampung dan Nasional	116



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum penulis menguraikan pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu akan dijelaskan istilah dalam skripsi ini untuk menghindari kekeliruan bagi pembaca. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahan tersebut disini diperlukan adanya pembatasan terhadap arti kalimat dalam skripsi ini. Dengan harapan memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud. Adapun judul skripsi ini berjudul “ Peran Dispenda Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Bandar Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam (2013-2016)” untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut :

1. Peran adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.¹

¹Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Edisi Baru : Rajawali Pers, Jakarta, 2009), h. 212-213

2. Dispenda adalah organisasi yang berada di bawah pemprov, pemerintah provinsi yang memiliki tanggung jawab dalam pemungutan pendapatan daerah melalui pengkoordinasian dan pemungutan pajak, retribusi, bagi hasil pajak, dana perimbangan, dan lain sebagainya.²
3. Pendapatan Asli Daerah adalah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang dipisahkan dan lain-lain.³
4. Islam adalah agama Tauhid. Perkataan Tauhid erat hubungannya dengan wahid (satu atau esa) dalam bahasa arab. Sebagai istilah yang dipergunakan dalam membahas ketuhanan (segala sesuatu mengenai Tuhan). Tauhid adalah keyakinan akan keesaan Tuhan yang dalam ajaran Islam disebut Allah.⁴
5. Ekonomi islam adalah suatu usaha sistematis untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku manusia dalam hubungannya kepada persoalan tersebut menurut perspektif ekonomi islam.⁵

² Bapenda.jabarpov.go.id (Kamis, 11 Mei 2017, 14:40 WIB)

³ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia*, (Jakarta : PT Rajagrafindo, 2013), h. 51-52

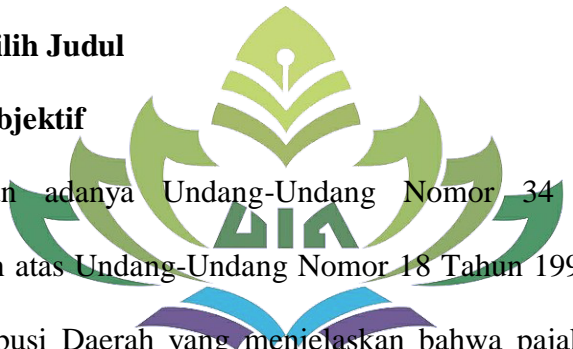
⁴ Zainuddin Ali, *PENDIDIKAN AGAMA ISLAM*, (Ed, 1 : Bumi Aksara, Jakarta, 2007), h. 2

⁵ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), h. 14

Secara keseluruhan penjelasan dari judul penelitian ini “Peran Dispenda Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam (2013-2016)” adalah bagaimana peranan Dinas Pendapatan Daerah dalam meningkatkan PAD kota Bandar Lampung ditinjau dari perspektif Islam (2013-2016), apakah PAD kota Bandar Lampung telah memenuhi target atau tidak, yang digunakan untuk menjalankan kegiatan baik untuk pembangunan maupun untuk kesejahteraan masyarakat di kota Bandar Lampung.

B. Alasan Memilih Judul

1. Secara Objektif



Dengan adanya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan Retribusi Daerah yang menjelaskan bahwa pajak daerah sebagai salah satu pendapatan asli daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, yang nantinya digunakan untuk pembiayaan pembangunan daerah itu sendiri oleh karena itu pemerintah daerah mengupayakan menggali potensi yang dan untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangan dengan menetapkan jenis pajak selain yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Salah satu


masalah yang di hadapi oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung adalah masih adanya wajib pajak yang melakukan manipulasi kecurangan, petugas penagihan tidak jujur, sampai permainan antara petugas penagih pajak dan wajib pajak, keberadaan data objek dan subjek pajak yang belum lengkap dan belum akurat serta penerimaan yang belum optimal karena target dari penerimaan pajak daerah dan pendapatan asli daerah di Kota Bandar Lampung belum terealisasi dengan baik, belum mencapai target yang sudah ditetapkan sehingga menarik untuk mengetahui bagaimana Peran Dinas Pendapatan Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandar Lampung yang ditinjau dalam perspektif Islam (2013-2016).

2. Secara Subjektif

Memberikan pengetahuan bagi penulis maupun pembaca tentang potensi penerimaan daerah dari pungutan pajak yang dikenakan oleh wajib pajak, apakah sudah efektif atau belum dan seberapa besarnya kontribusi yang diberikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandar Lampung yang ditinjau dalam Perspektif Islam dan juga dari aspek yang penulis bahas, permasalahan tersebut sangat memungkinkan untuk dibahas atau diteliti. Disamping itu pula data dari penelitian yang penulis lakukan ini dapat diperoleh melalui beberapa lembaga atau instansi yang terkait dan juga penelitian yang dilakukan oleh penulis ada relevansinya dengan ilmu yang penulis pelajari dari Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam.

C. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, daerah provinsi terbagi atas kabupaten/kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten/kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang.



Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Penyelenggaraan Otonomi Daerah perlu lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah yang seyogyanya pula disertai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*good governance*). Sehingga pemerintah pusat memberikan kebebasan kepada daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan daerahnya sendiri serta kepentingan masyarakat untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Pada penyelenggaraannya pemerintahan daerah, daerah diberikan kewenangan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.⁶

Pelaksanaan otonomi daerah menurut UU No 23 pasal 1 ayat 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Bab I ketentuan umum adalah hak, wewenang, dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang didasarkan pada prinsip yang luas, nyata dan bertanggung jawab mensyaratkan adanya tata kelola pemerintahan daerah yang sangat baik. Suatu tata kelola pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya transparansi dalam pengelolaan pemerintahan daerah, partisipasi yang aktif dalam masyarakat dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, untuk menciptakan tata kelola yang baik, seluruh elemen pemerintahan daerah harus senantiasa mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Tujuan pemberian kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, dan demokrasi. Atas dasar itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah sehingga member peluang kepada daerah agar leluasa mengatur dan melaksanakan kewenangannya sesuai dengan kepentingan

⁶Evita Sari, Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir Pada Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), jurnal ekonomi akutansi, universitas sriwijaya, (Palembang, 2013), h.1

masyarakat setempat dan potensi setiap daerah. Kewenangan ini pada dasarnya merupakan upaya untuk membatasi kewenangan pemerintah dan provinsi sebagai daerah otonom, karena pemerintah dan provinsi hanya diperkenankan menyelenggarakan kegiatan otonom sebatas ditetapkan.

Kota Bandar Lampung merupakan salah satu Daerah Otonom di Indonesia. Kota Bandar Lampung melaksanakan tugas otonomi daerah melalui perangkat daerah Kota Bandar Lampung diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah. Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan tugas otonomi daerah mengenai pengelolaan Pendapatan Asli daerah (PAD) yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).

Menurut Islam, negara memiliki hak untuk ikut campur dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu-individu, baik untuk mengawasi kegiatan maupun untuk mengatur atau melaksanakan beberapa macam kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh individu-individu. Intervensi pemerintah terhadap masalah-masalah perekonomian rakyat, menurut sebagian ulama berlandaskan pada firman Allah swt. Berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alquran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. an-Nisa: 59).⁷

Sejarah Islam mencatat, perkembangan kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam, mulai dari awal Islam sampai kepada puncak kejayaan Islam pada zaman pertengahan ternyata peran fiskal sangat penting untuk menunjang kehidupan ekonomi masyarakat dan negara. Pada zaman tersebut bagaimana Rasulullah saw. menerapkan tentang *ghanimah, jizyah, ushr, al-kharaj dan adh-dharibah*. Semua tersebut merupakan sumber pendapatan negara yang sangat bermanfaat untuk kepentingan masyarakat Islam.⁸

Pemeraatan pembangunan daerah sesungguhnya merupakan tanggung jawab warga negara dan masyarakat itu sendiri, sesuai kaitannya dengan pembangunan daerah dalam rangka otonomi daerah. Pendapatan asli daerah dan pengelolaan pendapatan asli daerah itu sendiri menjadi sangat penting untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pada hakikatnya pembangunan suatu daerah tergantung dari kemampuannya untuk mandiri secara finansial. Kemandirian finansial akan menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah untuk dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan serta seberapa besar ketergantungan daerah terhadap sumber-sumber eksternal. Artinya, semakain kecil ketergantungan daerah

⁷Tim Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1995), h. 990

⁸Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah: Berbagai Kasus yang Dihadapi "Hukum Islam" Masa Kini*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), h. 163.

dari sumber-sumber eksternal berarti daerah tersebut semakain mandiri dalam membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Untuk mendukung kegiatan Pemerintah Daerah yang setiap tahunnya selalu meningkat baik kegiatan rutin maupun pembangunan di segala bidang, maka konsekuensinya Pemerintah Daerah harus mampu menyediakan dana yang cukup besar untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut. Oleh karena itu sumber-sumber penerimaan perlu di tingkatkan secara efisien dan efektif terutama sumber Pendapatan Asli Daerah sendiri sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 baik yang berupa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan dan Kekayaan Daerah serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pembangunan dalam islam tidak hanya sebatas pembangunan infrastruktur tetapi pembangunan moral dan spiritual setiap masyarakatnya sangat diperlukan.⁹

Dalam pandangan ekonomi islam dijelaskan bahwa sumber-sumber penerimaan Negara pada zaman Rasulullah SAW diantaranya *zakat* (pajak spiritual yang wajib bagi setiap muslim (fardhu'ain) karena itu penerimaan zakat cenderung stabil akan menjamin program pengetasan kemiskinan dalam jangka waktu yang panjang,¹⁰ *Kharaj* (sejumlah harta yang wajib dibayarkan kepada negara atas hasil bumi), *Jizyah* (pajak yang dibebankan oleh pemerintah islam pada kalangan non-muslim sebagai kompensasi untuk jaminan perlindungan jiwa,harta,ibadah)¹¹,

⁹Nurul Huda, *Ekonomi Pembangunan Islam cetakan ke-1*, (Jakarta : Kencana, 2015), h.32

¹⁰Mustafa Edwin Nasution ,Yusuf Wibisono, *Zakat Sebagai Instrument Pengetasan Kemiskinan di Era Otonomi Daerah*, (Jakarta : 2005), h.83

¹¹Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam cetakan ke-3*,

Ushr (Pajak Bea Impor), *Laba proyek umum*, *Rusum*, *Shadaqoh*, *Wakaf*, *Amwal Fadhila* (harta warisan yang tidak ada ahli waris), *Nawaib*, *Khumus/ Rikaz* (harta temuan), *Ghanimah*, *Fay'I* (harta dari musuh saat perang), *uang tebusan* dan lain sebagainya.¹² Pada masa itu semua sumber tersebut digunakan untuk membiayai segala bentuk kegiatan wilayahnya untuk mensejahterakan umatnya dan memperluas wilayah Islam pada saat itu. Di zaman sekarang ini sumber-sumber penerimaan negara berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali potensi yang ada. Untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah, maka perlu adanya mencapai pelayanan dan pelaksanaan pembangunan secara efektif dan efisien dalam mendukung sumber pembiayaan daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah.

Hal ini menjelaskan bahwa manusia hanya diberi hak kepemilikan yang terbatas, yaitu sebagai pihak yang diberikan kewenangan untuk memanfaatkannya, dan inti dari kewenangan untuk memanfaatkan, dan inti dari kewenangan tersebut adalah tugas untuk menjadi seorang khalifah (agen pembangun/ pengelola) yang

(Jakarta: PT Grafindo Persada, 2011), h.488

¹²Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam : Pendekatan Ekonomi Makro Islam Dan Konvensional*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2005), h.31

beribadah di muka bumi ini.¹³ Maka dengan begitu khalifah atau pemerintah berusaha untuk menggunakan dengan sebaik apa yang telah Allah Swt berikan dimuka bumi ini guna kepentingan Pemerintah sebagai pemimpin suatu wilayah harus bertanggung jawab akan semua yang ada.

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah adalah pajak daerah, bahwa penerimaan dari pajak daerah merupakan penerimaan suatu daerah merupakan penerimaan suatu daerah yang hasilnya untuk sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Seperti dijelaskan dalam Kitab Suci Al-Qur'an Allah SWT berfirman dalam surat At-Taubah ayat 29 :



قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya : *“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”*.¹⁴

Pajak menurut Yusuf Qardhawi adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang harus disetorkan kepada Negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari Negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-

¹³ AL-Jumanatul Ali, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung : J-Art, 2004), h. 75

¹⁴ AL-Qur'an surat At-Taubah (09) : 29

pengeluaran umum, dilain pihak sebagai tujuan ekonomi social yang ingin dicapai oleh Negara.¹⁵

Pajak menurut pandangan islam, pajak secara umum berarti suatu pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam hal menyelenggarakan jasa-jasa untuk kepentingan umum.

Pajak menurut system ekonomi islam harus memenuhi empat unsur yaitu harus adanya nash (Al-Quran dan Hadist) yang memerintahkan setiap sumber dan pemungutannya, adanya pemisahan sumber penerimaan dari kaum muslim dan non muslim, system pemungutan pajak dan zakat harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan golongan makmur yang mempunyai kelebihan saja yang memikul beban utama, adanya tuntutan kemaslahatan umum.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa yang berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹⁶ Pajak menurut syariat dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *dharibah*¹⁷ yang artinya menetapkan, mewajibkan, menentukan memukul, menerangkan atau membebaskan.

¹⁵Yusuf Qordhawi, *Fikuz zakah Muassarat Ar-risalah Beirut Libanan* cet.II 1408/1998 terjemahan Didin Hafidudin, h. 32

¹⁶UU No. 28 tahun 2007. *Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP)*

¹⁷ Gusfahmi, S.E, M.A, *Pajak Menurut Syariat* Rajawali Pers 2007, h. 23

Abdul Qadim berpendapat pajak adalah harta yang diwajibkan Allah swt kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang/harta.¹⁸

Dari berbagai definisi tersebut, dapat dikemukakan oleh Abdul Qodim lebih dekat dan tepat dengan nilai-nilai syariah, karena di dalam definisi yang dikemukakannya terangkum lima unsur penting pajak menurut syariah, yaitu: diwajibkan oleh Allah Swt, obyeknya harta, subyeknya kaum muslim yang kaya, yang bertujuan untuk membiayai kebutuhan mereka, diberlakukan karenanya kondisi darurat (khusus), yang harus segera diatasi oleh Ulil Amri.

Pajak dalam perspektif konvensional, kadang juga dipungut kepada orang miskin, seperti PBB. Asal mula diterapkannya pajak menurut islam (*Dharibah*) Ibnu Taimiyah mengatakan: "tidak ada pertentangan peranan alokasi, peranan distribusi dan peranan stabilisasi". Pemerintah dalam menjalankan peranannya mengeluarkan biaya-biaya yang diperoleh dari berbagai sumber. Kegiatan ekonomi yang bervariasi, mendorong setiap daerah kabupaten atau kota untuk mengembangkan potensi ekonominya. Oleh karena itu pembangunan daerah dilaksanakan secara terpadu dan serasi serta diarahkan agar pembangunan yang berlangsung di setiap daerah benar-benar sesuai dengan prioritas dan potensi dimana pembangunan suatu daerah dapat berjalan dengan baik antara lain diperoleh dari pajak.¹⁹

¹⁸ Abdul Qodim Zallum *system keuangan di Negara islam*, (Pustaka Jakarta 2002), h. 37

¹⁹ *Ibid*, h. 3

Secara konvensional pajak dapat membantu suatu daerah untuk dapat mandiri dalam keuangan daerah, yang diperoleh dari pajak. Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah.²⁰

Pajak (*Dharibah*) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih. Pajak (*dharibah*) dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan. Menurut teori pajak konvensional, tidak akan dihapus karena hanya itu lah sumber pendapatan. Selain (*dharibah*) juga dalam islam ada yang disebut jizyah atau pajak yaitu jumlah harta yang dibebankan kepada non muslim khususnya ahli kitab yang berada dibawah tanggungan dan perjanjian dengan Negara islam jizyah, itu merupakan kewajiban atas pribadi karena keberadannya di daerah islam yang wajib dibayarkan sekali setahun.

Sumber-sumber pajak: PPh (pajak penghasilan), PPN (pajak pertambahan nilai), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).²¹ Dilihat dari struktur dan jenis-jenis pajak daerah pada saat ini, terlihat bahwa dasarnya mempunyai bermacam jenis pajak. Tetapi pada kenyataannya sebagian besar pajak kurang berpotensi bahkan diantaranya yang tidak efisien dalam arti biaya pemungutannya lebih besar dari pendapatan yang

²⁰ Simanjuntak, *Manajemen Keuangan Publik*, Erlangga. Jakarta, 200, h. 32

²¹ Agus Hendra, *Sulitnya mendefinisikan pajak*, Opini berita pajak, 2005, h. 73

diterima. Hal ini berakibat berkurangnya pendapatan asli daerah (PAD) dari yang seharusnya diterima. Masalah inilah yang banyak dihadapi Kota Bandar Lampung karena itu perlu peran Dinas Pendapatan Daerah (PAD) sebagai pengelola pendapatan daerah.

Dengan adanya sumber-sumber pendapatan daerah Bandar Lampung untuk dapat menghimpun secara maksimal pendapatan tersebut. Setelah sumber-sumber pendapatan daerah dapat diketahui secara pasti bagaimana cara menghimpun, berapa besar dan kapan akan dilakukan. Sumber-sumber yang telah dikumpulkan dimaksudkan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya.

Potensi yang dapat digali oleh pemerintah kota Bandar Lampung untuk meningkatkan penerimaan daerahnya ialah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari sektor pajak dilakukan dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi yaitu melalui penggalan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang digalakan, sehingga diharapkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD terus meningkat.²² Tetapi pada kenyataannya pendapatan daerah khususnya pada sector Pajak Daerah Kota Bandar Lampung pada kurun waktu 2013-2016 tidak terealisasi, yang disebabkan oleh rendahnya pemahaman wajib pajak tentang pajak. Dan adanya informasi yang diberitakan oleh media *Tribun Lampung.com* yaitu sebagai berikut :

²²Yuliati. *Akuntansi Sektor Publik Cetakan Kelima*, (Salemba Empat : Jakarta, 2000) , h. 45

“Kabar berita yang dikutip di Tribun Lampung news”, Komisi II DPRD Bandar Lampung mensinyalir ada dugaan kebocoran sejumlah pajak pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor rumah makan, restoran dan reklame. Yang menjadi penyebab utama realisasi PAD hingga Oktober ini masih berkisar 50 persen. Menurut Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Bandar Lampung Nu'man Abdi, dugaan kebocoran PAD, didapat setelah pihaknya melakukan cross cek ke sejumlah wajib pajak di lapangan. "Ada beberapa faktor penyebab kebocoran PAD, mulai wajib pajak yang melakukan manipulasi kecurangan, petugas penagihan tidak jujur, sampai permainan antara petugas penagih pajak dan wajib pajak," jelas Nu'man Abdi dalam rapat kerja dengan tiga UPTD Dispenda, Rajabasa, Telukbetung Utara, dan Way Halim, di ruang komisi II DPRD.²³

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandar Lampung
Tahun 2013 -2016

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2013	Rp. 264,651,003,114	Rp. 238,115,511,465	89,97 %
2	2014	Rp. 283,050,000,000	Rp. 241,130,668,603	85,19 %
3	2015	Rp. 434,850,000,000	Rp. 253,181,191,950	58,22 %
4	2016	Rp. 519,869,360,000	Rp. 324,667,322,496	62,45 %

Sumber : Data Dispenda Kota Bandar Lampung Tahun 2017

Berdasarkan data yang disajikan diatas dapat kita diketahui bahwa target dan realisasi Pajak daerah Kota Bandar Lampung mengalami pencapaian realisasi tertinggi adalah pada tahun 2013 yaitu mencapai 89,97 % akan tetapi pada tahun

²³ Inilah penyebab PAD Bandar Lampung baru 50 persen tersedia, <http://Lampung.Tribunnews.com> pada tanggal, 11 Mei 2017, 12:15 WIB

berikutnya mengalami penurunan sebesar 85,19 %, dan tahun berikutnya pun mengalami pemerosotan. Sedangkan untuk realisasi paling kecil sebesar 58,22 % pada tahun 2015 hal tersebut dikarenakan tingkat pendapatan pada tahun 2015 lebih sedikit bila dibandingkan dengan penerimaan pada tahun 2014.

Kota Bandar Lampung dalam 4 tahun terakhir mengalami peningkatan dari realisasi 4 tahun terakhir, namun dari 4 tahun terakhir tidak terealisasinya target pajak daerah dan pendapatan asli daerah, hal ini diperlukan peranan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) yang lebih besar lagi, untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam era otonomi daerah sekarang, dilihat dari sumber pendapatan daerah adalah pajak daerah yang dapat digali oleh pemerintah kota Bandar Lampung untuk meningkatkan penerimaannya ialah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari sektor pajak. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung adalah wajib pajak yang melakukan manipulasi kecurangan, petugas penagihan tidak jujur, sampai permainan antara petugas penagih pajak dan wajib pajak, keberadaan data objek dan subjek pajak yang belum lengkap dan belum akurat serta penerimaan yang belum optimal sehingga menarik untuk mengetahui peran Dinas Pendapatan Daerah dalam meningkatkan Pendapatan asli daerah dan juga mengetahui upaya pemerintah untuk menyadarkan akan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Dispenda Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Bandar Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam (2013-2016)”

D. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya dalam penulisan ini maka penulis mengambil batasan masalah yang diteliti. Adapun penelitian ini di fokuskan kepada Pendapatan Asli Daerah khususnya di sector Pajak Daerah, karena Dispenda ialah sebuah lembaga yang hanya mengelola Pajak Daerah, Bagaimana upaya Dispenda dalam mengelola Pajak Daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta tinjauan Ekonomi Islamnya.

E. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan pendapatan daerah ?
2. Bagaimana peran Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan pendapatan daerah ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam ?

F. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peran Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan pendapatan daerah.
- b. Untuk mengetahui peran Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan pendapatan daerah dalam perspektif Ekonomi Islam.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis, penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran keilmuan serta wacana disiplin ilmu atau memperkaya konsep-konsep

teori-teori terhadap ilmu pengetahuan mengenai peran Dispenda dalam meningkatkan PAD dalam perspektif Ekonomi Islam.

- b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan serta penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi masyarakat dan mahasiswa atau bagi penelitian lainnya dan dapat dijadikan bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya. Dan diharapkan mampu dijadikan sebagai informasi untuk umat Islam mampu menjadi acuan semangat pengembangan perpajakan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif. Metode kualitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* dari pada *generalisasi*.²⁴ Dilihat dari jenisnya (menurut tempat dilaksanakannya penelitian), penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang berada di dalam kehidupan

²⁴ Sugioyo, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. (Bandung : Alfabeta, 2011), h .9

sebenarnya yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit baik individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.²⁵

Selain menggunakan *field research* penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) penelitian dengan membaca, menelaah dan mencatat bahan dari berbagai literature yang berhubungan langsung dan yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Didalamnya terdapat upaya-upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesa.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil observasi yang biasa dilakukan oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini adalah data-data yang diperoleh secara langsung dari lapangan atau

²⁵Hadi Sutrisno, *Metode Research* (Yogyakarta : UGM, 2002), h.142

sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data ²⁶, yaitu dari lokasi penelitian pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung melalui wawancara langsung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.²⁷Data ini diperoleh dari media cetak, jurnal, buku-buku yang berhubungan dengan penelitian, data-data resmi instansi pemerintah dan data serta informasi dari Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA).

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan suatu kegiatan pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber, seperti buku yang memuat berbagai ragam kajian teori yang sangat dibutuhkan, majalah, naskah, kisah sejarah, dan dokumen.²⁸

b. Wawancara

Wawancara (interview) adalah suatu bentuk komunikasi verbal. Jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.²⁹Wawancara

²⁶ Husen Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 42

²⁷ *Ibid*, h.43

²⁸ Nurul Zariah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta, Bumi Aksara:2007), h. 191

²⁹ H. Moh. Pabundo Tika, *Metodelogi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h.62.

merupakan metode pengumpulan data dengan tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian. Dalam proses ini penulis melakukan wawancara yang bersifat bebas (berbincang-bincang) dengan Kabid bagian Pajak di Dispenda.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara mencari data atau informasi dari buku-buku, catatan-catatan, transkrip, legger, agenda dan lain sebagainya.³⁰ Jadi, metode dokumentasi ini merupakan suatu cara untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Sumber yang akan dijadikan alasan metode ini adalah catatan atau transkrip dokumen terkait penerimaan pendapatan daerah Bandar Lampung. Jadi dengan demikian penulis hanya mengadakan penelitian dengan mengamati dan mencatat hal-hal yang diperlukan.

4. Analisis Data

Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data yaitu data reduction, data display dan conclusion drawing/ verification.

³⁰Soewadji Jusuf, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), h.160

a. Data Reduction (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

b. Data Display (Penyajian Data)

Penyajian data dapat dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sebagainya.

c. Conclusion Drawing / Verification

Conclusion drawing / verification adalah penarikan kesimpulan dan memverifikasi hasil temuan yang akan menjawab rumusan masalah penelitian yang dirumuskan sejak awal.

Setelah penulis memperoleh data-data dan informasi yang diperlukan dari lapangan, lalu penulis mengolahnya secara sistematis sesuai dengan sasaran permasalahan yang ada dan menganalisisnya. Penulis akan menganalisis secara deskriptif kualitatif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat dimengerti. Analisis deskriptif ini dipergunakan dengan menguraikan dan merinci kalimat-kalimat yang ada dengan menggunakan pendekatan berfikir deduktif.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Peran

1. Pengertian Peran

Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran tidak lepas hubungannya dengan tugas yang diemban seseorang. Seorang ayah adalah orang yang mempunyai tugas mencari nafkah dan melindungi anggota keluarga. Seorang ulama adalah orang yang mengajak dan menyerukan berbuat baik atau kebajikan dan meninggalkan kemungkaran. Camat adalah orang yang memimpin pembangunan dan kemasyarakatan ditingkat kecamatan. Dengan demikian peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dijalankan.³¹

Pengertian lain dari peran adalah sebagaimana dikemukakan oleh J.R.da Allen.V.L yang dikutip oleh Miftah Thoha dalam bukunya kepemimpinan manajemen bahwa peran adalah “suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan”. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan

³¹Tim Penyusun kamus Pusat Pembinaan & Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), Cet. Ke-2, h. 240.

berkelompok akan terjadi interaksi antaranggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu maka muncullah apa yang dinamakan peran.

Selain itu menurut Yasyin, peranan adalah sesuatu yang diperbuat, sesuatu tugas, sesuatu hal yang pengaruhnya pada suatu peristiwa. Sedangkan menurut Soekanto, peran adalah segala sesuatu oleh seseorang atau kelompok orang dalam melakukan suatu kegiatan karena kedudukan yang dimilikinya. Dalam hubungan ini peranan menyangkut tiga hal yaitu:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat atau organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai individu yang penting dalam struktursosial masyarakat.³²

Berdasarkan pengertian diatas maka penulis melihat bahwa dalam peran terdapat unsur individu sebagai subyek yang melakukan peranan tertentu. Selain itu, dalam peran dapat pula adanya status atau kedudukan seseorang dalam suatu masyarakat, artinya jika seseorang memiliki kedudukan (status) maka yang bersangkutan menjalankan peran tertentu pula.

³²Soerjono Soekarto, *Tuntunan Dakwah dan Pembinaan Pribadi*, (Jakarta : Pustaka Amini, 1983), Cet. Ke-2, h. 15.

Dengan demikian antara peran dan kedudukan merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Peran merupakan suatu tindakan yang memberikan kontribusi yang dapat menghasilkan beberapa perubahan. Definisi tersebut sangat relevan dengan pemerintah daerah yang memiliki peran dalam meningkatkan pembangunan daerah yang mendorong kesejahteraan masyarakat.

2. Peran Pemerintah

Pemerintah berasal dari kata “perintah” yang berarti sesuatu yang harus dilaksanakan. Di dalam bahasa Inggris, istilah pemerintahan dan pemerintah tidak memiliki perbedaan yang disebut dengan “*government*”. Istilah ini bersumber dari latin yaitu “*gubernaculum*” yang berarti kemudi. Kata *government* dapat bermakna, melaksanakan wewenang pemerintahan, cara atau sistem memerintah, fungsi atau kekuasaan untuk memerintah, wilayah atau Negara yang diperintah, badan yang terdiri dari orang-orang yang melaksanakan wewenang dan administrasi hukum dalam suatu Negara. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintah yang dimaksud adalah Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung khususnya Dinas Pendapatan Daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah.

3. Peran Pemerintah dalam Pandangan Ekonomi Islam

Menurut Mannan, ilmu ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi syari'ah tidak hanya membahas tentang aspek perilaku manusia yang berhubungan dengan cara mendapatkan uang dan membelanjakannya, tetapi juga membahas segala aspek ekonomi yang membawa kepada kesejahteraan umat.³³

Menurut Baqir ash-Sadr pemilikan negara mendominasi sistem ekonomi Islam yang pada akhirnya akan mendorong lahirnya sebuah gagasan bahwa peran pemerintah dalam bidang ekonomi sangatlah penting. Dalam hal ini, beberapa fungsi pokok pemerintah dalam bidang ekonomi antara lain mengatur sistem distribusi kekayaan berdasarkan pada kemauan dan kapasitas kerja masing-masing individu dalam masyarakat, mengintegrasikan aturan hukum Islam dalam setiap penggunaan dan pengelolaan sumber daya alam, dan membangun sistem kesejahteraan masyarakat melalui terjaminnya keseimbangan sosial dalam masyarakat.³⁴

³³Nurul Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syari'ah* (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 7

³⁴ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 324-325.

B. Konsep Otonomi Daerah

1. Pengertian Otonomi Daerah

Pengertian Otonomi Daerah menurut Winarna Surya adalah wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah, yang melekat pada negara kesatuan maupun pada negara federalisasi. Di negara kesatuan otonomi daerah lebih terbatas daripada di negara yang berbentuk federasi. Kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangga daerah di negara kesatuan meliputi segenap kewenangan pemerintah kecuali beberapa urusan yang dipegang oleh Pemerintah Pusat.³⁵

Sedangkan pengertian Otonomi Daerah menurut Hari Sabarno adalah merupakan kebijakan dan pilihan strategis dalam rangka memelihara kebersamaan nasional di mana hakikat khas daerah tetap dipertahankan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui otonomi daerah pemerintah menguatkan sentra ekonomi kepala daerah dengan memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengurus dan mengelola potensi ekonominya sendiri secara proporsional.

Dengan demikian, kekuatan ekonomi akan tersebar di seluruh daerah dengan mengandalkan kekuatan potensi ekonomi daerah dengan mengandalkan kekuatan potensi ekonomi daerahnya masing-masing.³⁶

³⁵ Winarna surya, *Otonomi Daerah Di Era Reformasi*, (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2002), h. 1

³⁶ Hari sabarno, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), h. 12

Menurut Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 34 Tahun 2004 dimana Pemerintah Daerah mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka daerah dipacu untuk dapat mencari sumber pendapatan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah.

Dari beberapa pendapat di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian Otonomi Daerah adalah sebagai pemberian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (kabupaten dan kota) untuk mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangganya sendiri dan masyarakat setempat (daerah otonom) secara sendiri dan mandiri.

2 .Tujuan Otonomi Daerah

Tujuan Otonomi Daerah menurut UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 2 ayat 3 menyebutkan bahwa tujuan Otonomi Daerah adalah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Berikut pemaparannya :

a. Meningkatkan pelayanan umum

Dengan adanya Otonomi Daerah diharapkan adanya peningkatan pelayanan umum secara maksimal dari lembaga pemerintah masing-masing daerah. Dengan pelayanan yang maksimal tersebut, diharapkan

masyarakat dapat merasakan secara langsung manfaat dari otonomi daerah.

b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Setelah pelayanan maksimal dan memadai, diharapkan kesejahteraan masyarakat Pendapatan Asli Daerah suatu daerah otonom bisa lebih baik dan meningkat. Tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut mewujudkan bagaimana Daerah Otonom bisa menggunakan hak dan wewenangnya secara tepat, bijak dan sesuai dengan yang diharapkan.

c. Meningkatkan daya saing daerah

Dengan menerapkan Otonomi Daerah diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah dan harus memperlihatkan bentuk keaneka ragaman suatu daerah serta ke khususan atau keistimewaan daerah tertentu serta tetap mengacu pada Pendapatan Asli Daerah, semboyan Negara kita “Bhineka Tunggal Ika” walaupun berbeda-beda tapi tetap satu jua.

3. Indikator Otonomi Daerah

Indikator yang dapat menentukan keberhasilan Otonomi Daerah meliputi empat faktor, antara lain :

a. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia adalah pengukuran perbandingan, nilai indeks Pembangunan Manusia diukur berdasarkan tiga indikator sebagai acuannya yaitu tingkat harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar

hidup untuk semua Negara seluruh dunia.³⁷ Sumber daya manusia adalah seseorang yang siap, mau dan mampu memberi sumbangan terhadap pencapaian tujuan organisasi.

b. Keuangan

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 1 ayat 5 yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam rangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).³⁸

Pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya menyangkut tiga aspek analisis yang saling terkait satu dengan yang lainnya, yang terdiri dari :

1) Analisis penerimaan.

Yaitu analisis mengenai kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang potensial dan biaya-biaya dikeluarkan untuk meningkatkan pendapatan tersebut.

³⁷Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan Edisi 5*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2015, h.

³⁸*Ibid*, h. 47

2) Analisis pengeluaran.

Yaitu analisis mengenai seberapa besar biaya-biaya dari suatu pelayanan public dan factor-faktor yang menyebabkan biaya-biaya tersebut meningkat.

3) Analisis anggaran.

Yaitu analisis mengenai hubungan antara pendapatan dan pengeluaran serta kecenderungan yang di proyeksikan untuk masa depan.

4) Peralatan

Undang-undang nomor 28 tahun 2004 pasal 1 ayat 4 dikatakan bahwa jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang di peruntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah atau air di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel. Penyelenggaraan jalan jalan berdasarkan pada asas kemanfaatan, keamanan, keselamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan, transparasi dan akuntabilitas, keberdayagunaan serta kebersamaan dan kemitraan.

c. Organisasi dan Manajerial

Organisasi dan Manajerial adalah suatu alat atau wadah bagi pemerintah untuk mengambil keputusan dan membuat kebijakan atas tugas yang dilaksanakan.³⁹

C. Konsep Pendapatan Asli Daerah

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.⁴⁰

Pendapatan Asli Daerah menurut Ahmad Yani adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴¹

³⁹ *Ibid*, h. 47

⁴⁰ Ahmad yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), h. 51-52

⁴¹ *Ibid*, h.51

Sedangkan pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Abdul Halim adalah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah Yang Dipisahkan dan lain-lain.⁴²

Kemudian Aries Djaenuri mendefinisikan Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan prundang-undangan yang berlaku.⁴³

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Pendapatan asli daerah merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas (subsidi).⁴⁴ Pendapatan Asli Daerah dikategorikan dalam pendapatan rutin Anggaran dan Belanja Daerah (APBD). Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu pendapatan yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasan daerah dalam menggali pendapatan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan atas desentralisasi.

⁴² Abdul Halim, Muhammad Syam Kusufi, *Lok. Cit*, h. 101.

⁴³ Aries Djaenuri, *Lok. Cit*, h. 88

⁴⁴ A.W. Widjaja, *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, h. 32

Jadi dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber ekonomi dalam potensi-potensi wilayahnya sendiri seperti pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain yang sah serta penerimaan keuangan yang diatur berdasarkan peraturan pemerintah dan perundang-undangan.

Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, daerah dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor. Yang dimaksud dengan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi adalah peraturan daerah yang mengatur pengenaan pajak dan retribusi oleh daerah terhadap objek-objek yang telah dikenakan pajak oleh pusat dan provinsi sehingga menyebabkan menurunnya daya saing daerah.

2. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Sumber pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah. Sumber-sumber pendapatan asli daerah ini digali sesuai dengan potensi dan kemampuan daerah masing-masing.

a. Pajak Daerah

Perpajakan daerah adalah kewajiban penduduk (masyarakat) menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada daerah disebabkan suatu keadaan, kejadian atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai suatu sanksi atau hukuman.⁴⁵

Pajak daerah, sebagai salah satu pendapatan asli daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. meskipun beberapa jenis pajak daerah sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.⁴⁶

1) Jenis dan Objek Pajak Daerah

Jenis pajak daerah terbagi menjadi dua macam yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Jenis pajak provinsi terdiri dari sebagai berikut :

⁴⁵Rahardjo Adisasmita, *Pembiayaan Pembangunan Daerah*,(Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), h. 77

⁴⁶ Ahmad yahi, *Op.Cit*, h. 53

- a) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air .

Objek Pajak Kendaraan Bermotor Dan Kendaraan Di Atas Air adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.

- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air. Objek pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air adalah penyerahan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.

- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

- d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Objek pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan adalah pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan.⁴⁷

Jenis pajak kabupaten/kota terdiri dari sebagai berikut :

- a) Pajak Hotel. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran termasuk fasilitas penginapan, pelayanan pengunjung, dan jasa persewaan gedung untuk kegiatan atau pertemuan di hotel
- b) Pajak Restoran. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran.

⁴⁷ Ahmad Yani, *Op.Cit*, h. 54

- c) Pajak Hiburan. Objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut biaya.
- d) Pajak Reklame. Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
- e) Pajak Penerangan Jalan. Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, di wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.
- f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C. Objek pajak pengambilan bahan galian golongan C adalah kegiatan pengambilan bahan galian golongan C
- g) Pajak Parkir. Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.⁴⁸

⁴⁸ Drs. Darwin., MBP, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2010), h. 119-128

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah, sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Pengertian Retribusi Daerah menurut Mardiasmo adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.⁴⁹

Sedangkan pengertian Retribusi Daerah menurut Ahmad Yani adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.⁵⁰

Menurut beberapa ahli, pengertian tentang Retribusi Daerah di atas dapat diambil kesimpulan bahwa. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat atau badan.

⁴⁹ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revis Tahun 2011*, (Yogyakarta : CV ANDI OFFSET, 2011), h.15


⁵⁰ Ahmad yani, *Op.Cit*, h. 63

Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial- ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi.⁵¹

1) Objek Retribusi Daerah

Objek Retribusi Daerah adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Jasa tertentu tersebut dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu sebagai berikut⁵² :

a) Retribusi Jasa Umum



Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis-jenis retribusi jasa umum yaitu Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP Dan Akta Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat, Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi

⁵¹ Aries Djaenuri, *Op.Cit*, h. 95

⁵² Ahmad yani, *Op.Cit*, h. 64-71

Penggantian Biaya Cetak Peta, Dan Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.

b) Retribusi Jasa Khusus

Retribusi Jasa Khusus adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh pihak swasta. Jenis-jenis retribusi jasa khusus yaitu, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Penginapan/Villa, Retribusi Penyedotan Kakus, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal, Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga, Retribusi Penyebrangan Di Atas Air, Retribusi Pengolahan Limbah Cair, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

c) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan

sumber daya alam, barang, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu yaitu, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaan APBD. Jika pengelolaan tersebut memperoleh laba, maka laba tersebut dapat dimasukkan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini mencakup yaitu, Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta Atau Kelompok Usaha Masyarakat.⁵³

⁵³ *Ibid*, h.73-74

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ini di beberapa daerah, misalnya didapatkan dari sumber berikut: Hasil penjualan barang milik daerah, Jasa giro, Sumbangan pihak ketiga, Penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah, setoran kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan daerah,⁵⁴ pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, fasilitas sosial dan umum, pendapatan dari angsuran/cicilan penjuala, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan.⁵⁵

3. Pendapatan Asli Daerah dalam Perspektif Ekonomi Islam

Sebagai sebuah ajaran hidup yang lengkap, Islam memberikan petunjuk atas semua aktivitas manusia, termasuk ekonomi. Oleh karenanya tujuan diturunkannya syariat Islam, yaitu untuk mencapai *falah* (kesejahteraan/keselamatan) baik dunia maupun akhirat. Untuk mencapai kesejahteraan tersebut tugas pemerintah haruslah dapat menjamin kepentingan sosial masyarakatnya dengan cara memenuhi kepentingan publik untuk rakyatnya.

Nurul Huda menjelaskan dalam konsep Islam, pemenuhan kepentingan sosial merupakan tanggung jawab pemerintah, Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan, memelihara, dan mengoperasikan

⁵⁴ Aries Djaenuri, *Op.Cit*, h. 99

⁵⁵ Ahmad yani, *Op.Cit*, h. 74

Public utilities (pelayanan publik) untuk menjamin terpenuhinya kepentingan sosial.⁵⁶

Dalam pemikiran Islam menurut An-Nabahan dalam Adi, Pemerintah merupakan lembaga formal yang mewujudkan dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada semua rakyatnya. Pemerintah mempunyai segudang kewajiban yang harus dipikul demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya bertanggung jawab terhadap perekonomian.⁵⁷

Untuk mewujudkan dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat sebagai tanggung jawab pemerintah agar menciptakan kesejahteraan, pemerintah memiliki kebijakan fiskal yang digunakan untuk mengatur pemerintahannya. Tujuan dari kebijakan fiskal dalam Islam adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pendapatan, ditambah dengan dengan tujuan lain yang terkandung dalam aturan Islam yaitu Islam menetapkan pada tempat yang tinggi akan terwujudnya persamaan dan demokrasi, ekonomi Islam akan dikelola untuk membantu dan mendukung ekonomi masyarakat yang terbelakang.⁵⁸

⁵⁶ Nurul Huda dkk, *Keuangan Publik Islam: Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, (Jakarta : Kencana, 2012),h. 1

⁵⁷ Nurul Huda, et al, *Op.Cit*, h. 190

⁵⁸ *Ibid*, h. 191

Pada masa Islam, Pemerintah menggunakan biaya-biaya untuk melakukan pembangunan sebagai salah satu tanggung jawab terhadap masyarakat agar dapat terus merasa sejahtera. Terkait pembiayaan sektor publik oleh Negara, adapun sumber-sumber pendapatan Negara di zaman Rasulullah SAW, sebagai berikut

a. Zakat

Zakat adalah sebagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan kepada pemerintah/pengurus kaum muslimin, untuk membiayai kebutuhan bersama terutama menyangkut pengembangan SDM. Pada periode Mekkah zakat disyariatkan sebagai anjuran yang bersandar pada kesadaran pribadi Muslimin akan perlunya membentuk sebuah masyarakat atau umat yang berkeadilan dengan jalan membebaskan kemiskinan dan kekafiran lainnya. Sedangkan pada periode Madinah, pungutan zakat menjadi wajib dan diambil alih oleh pemerintah dengan menugaskan amil atau petugas pemungut.⁵⁹ Seperti yang telah dijelaskan dalam firman Allah SWT, dalam QS. Al- Baqarah (2) ayat 43 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: *Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.*⁶⁰

⁵⁹ Nurul Huda dkk, *Op. Cit.*, h. 25-26

⁶⁰ Al-Quran, 2:43.

b. *Kharraj*

Sumber pendapatan yang pertama kali diperkenalkan di zaman Rasulullah SAW, adalah *kharraj*. *Kharraj* adalah pajak terhadap tanah, atau di Indonesia setara dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perbedaan yang mendasar antara sistem PBB dengan sistem *Kharraj* adalah bahwa *Kharraj* ditentukan berdasarkan tingkat produktivitas dari tanah (*Land Productivity*) bukan berdasarkan *Zoning*. Hal ini berarti bahwa bisa jadi untuk tanah yang berseblahan sekalipun misalnya di satu sisi ditanami anggur sedangkan di sisi lain ditanam kurma, maka mereka harus membayar jumlah *Kharraj* yang berbeda.⁶¹ Seperti yang telah dijelaskan dalam firman Allah SWT, dalam QS. Al-Baqarah ayat 267 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ
وَلَا تَيْمَمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

⁶¹ Adiwarman Karim, *Ekonomi Makro Islam Edisi ke-3*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), h. 257

c. *Khums*

Para ulama *Syi'i* mengatakan bahwa sumber pendapatannya apa pun harus dikenakan *Khums* sebesar 20%, sedangkan ulama *Sunni* beranggapan bahwa ayat ini hanya berlaku untuk harta rampasan perang saja. Imam Abu Ubaid dalam *Adi* menyatakan bahwa yang di maksud *Khums* ini bukan saja hasil perang, tetapi juga barang temuan dan barang tambang.⁶² Seperti yang telah dijelaskan dalam firman Allah SWT, dalam QS. Al-Anfal ayat 1 :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ۖ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۚ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah: "Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul, oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu; dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman".

d. *Ghonimah dan Fa'i*

Jika tanah dan harta lain diperoleh dari peperangan disebut *Ghonimah*, jika pergantian pemerintahan tidak dengan peperangan tetapi mungkin dengan kudeta atau memengkan pemilu, penyerahan secara damai Negara jajahan dan cara-cara lain maka tanah Negara dan harta benda lainnya disebut *Fa'i*.⁶³

⁶² *Ibid*, h. 264

⁶³ Nurul Huda dkk, *Op.Cit*, h. 30

أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا ، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكْتُهُ الصَّلَاةَ فَلْيُصَلِّ ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي ، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً ، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً (رواه البخاري)

Artinya: “Aku telah diberikan lima hal yang tidak diberikan kepada seorang pun sebelumku, aku dimenangkan dengan perasaan takut (dalam diri musuh) sejauh satu bulan perjalanan, bumi dijadikan bagiku masjid dan suci maka siapapun yang mendapati waktu sholat maka hendaklah ia sholat, ghanimah dihalalkan bagiku dan tidak dihalalkan bagi seorangpun sebelumku, aku diberikan syafaat, Nabi hanya diutus pada kaumnya saja, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia”.

(HR. Bukhari)

Fai disyariatkan melalui firman Allah dan juga atsar. Adapun firman Allah adalah

وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kudapun dan (tidak pula) seekor untapun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap apa saja yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu”. (QS. Al-Hasyr: 6-7)

e. *Jizyah*

Jizyah adalah pajak yang dibayar oleh orang-orang non-muslim sebagai pengganti fasilitas sosial-ekonomi dan layanan kesejahteraan lainnya, serta untuk mendapatkan perlindungan keamanan dari Negara Islam. *Jizyah* sama dengan Pull Tax, karena orang-orang non-muslim tidak mengenal zakat fitrah. Jumlah yang harus dibayar sama dengan jumlah minimum yang dibayar oleh orang Islam. Seperti dijelaskan dalam Kitab Suci Al-Qur'an Allah SWT berfirman dalam surat At-Taubah ayat 29 :



Artinya : *Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah),(yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunjuk”*.⁶⁴

⁶⁴Al-Quran, 9:29.

f. Pendapatan Lainnya

Pendapatan lainnya pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat diantaranya yaitu ada yang disebut *Kaffarah*, yaitu denda misalnya denda yang dikenakan kepada suami istri yang berhubungan di siang hari pada bulan puasa. Mereka harus membayar denda dan denda tersebut masuk dalam pendapatan Negara.⁶⁵

Menurut Huda, Disamping penerimaan Negara yang pokok, pemerintah Negara Muslim juga memiliki sumber pendapatan lainnya seperti *Wakaf* (pemberian aset pribadi dari rakyat untuk kebutuhan publik yang terbatas maupun tidak terbatas, lalu *Kalalah* (bagian Negara dari warisan), dan barang temuan, harta karun, dan lainnya. Jika kebutuhan publik belum terpenuhi, Negara dapat memungut pajak tambahan. Negara juga dapat menerbitkan surat utang baik kepada rakyat maupun Negara lain yaitu *Sukuk*.⁶⁶

D. Konsep Pajak Daerah

1. Pengertian Pajak Daerah

Pajak Daerah menurut Mardiasmo adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara

⁶⁵ Adiwarman Karim, *Op.cit*, h. 266

⁶⁶ Nurul Huda dkk, *Op.Cit*, h. 35

langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Daerah menurut Trisni Suryarini adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah Daerah dan pembangunan Daerah.⁶⁷

2. Jenis Pajak Dan Objek Pajak

Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu :

a. Pajak Provinsi, terdiri dari :

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- 4) Pajak Air Permukaan
- 5) Pajak Rokok

b. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari :

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan

⁶⁷ Azhari Samudra, *Perpajakan Di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2015, h. 145

- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- 7) Pajak Parkir
- 8) Pajak Air Tanah
- 9) Pajak Sarang Burung Walet
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, jenis Pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan Pajak untuk daerah kabupaten /kota.

3. Tarif Pajak

Tarif untuk setiap jenis pajak adalah :

- a. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut :
 - 1) Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% dan paling tinggi sebesar 2%.
 - 2) Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tariff dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% dan paling tinggi sebesar 10%.⁶⁸
- b. Tarif pajak Kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan

⁶⁸ *Ibid*, h. 145.

Kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% dan paling tinggi sebesar 1%.

- c. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% dan paling tinggi sebesar 0,2%.
- d. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut :
 - 1) penyerahan pertama sebesar 20%
 - 2) penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%
- e. Khusus untuk Kendaraan Bermotor alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut :
 - 1) Penyerahan pertama sebesar 0,75%
 - 2) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075%
- f. Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10% Khusus tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% lebih rendah dari tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk kendaraan pribadi.
- g. Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%
- h. Tarif Pajak Rokok ditetapkan paling tinggi sebesar 10%

- i. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10%
- j. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10%
- k. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35%
- l. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25%
- m. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%
- n. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25%
- o. Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30%
- p. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20%
- q. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10%
- r. Tarif Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3%
- s. Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5%

Tarif pajak tersebut di atas ditetapkan dengan Peraturan Daerah.⁶⁹

4. Tata Cara Pemungutan Pajak

Pemungutan Pajak dilarang diborongkan. Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

⁶⁹Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, Yogyakarta, 2011, h. 15

Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis dan nota perhitungan.

Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).

5. Kedaluwarsa penagihan pajak

Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah. Namun demikian, kedaluwarsa tersebut dapat tertanggu apabila :

- a. Diterbitkan Surat Teguran (kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian suratteguran) dan diterbitkan Surat Paksa.
- b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung atau tidak langsung, artinya dengan kesadaran sendiri Wajib Pajak menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya, atau Wajib Pajak mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran/keberatan.⁷⁰

⁷⁰*Ibid*, H. 16

Wewenang Kepala Daerah di samping menagih pajak dengan menggunakan surat ketetapan (SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD) dan surat keputusan (pembetulan, keberatan, banding) yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya, dapat menagih pajak tersebut dengan Surat Paksa. Dasar hukum pelaksanaan Surat Paksa didasarkan pada peraturan perundang-undangan perpajakan di bidang penagihan pajak.

6. Sanksi Administrasi

- a. Penagihan Pajak Daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar dikenakan sanksi 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- b. Penagihan Pajak dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak. Sanksi administrasi ini tidak akan dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkannya sebelum diadakan tindakan pemeriksaan.
- c. Penagihan pajak dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang bayar dengan perhitungan secara jabatan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 25% dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama

24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar.

- d. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak Daerah karena pajak tidak atau kurang dibayar atau karena adanya penelitan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan, dan ditagih melalui Surat Tagihan Pajak Daerah.
- e. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempa pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan, dan ditagih melalui Surat Tagihan Pajak Daerah.⁷¹

Kepala Daerah karena jabatannya atau atau permohonan Wajib Pajak, dan berlandaskan unsur keadilan berwenang membetulkan dan membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar yang dalam penerbitannya terhadap kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan perundang-undangan perpajakan daerah. Selain kewenangan-kewenangan tersebut diatas, Kepala Daerah juga berwenang untuk mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

⁷¹*Ibid*, h, 16

7. Sanksi Pidana

- a. Wajib Pajak yang karena kepalannya tidak menyampaikannya Surat Pemberitahuan Pajak daerah atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 2 kali jumlah pajak yang terutang.⁷²
- b. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan dengan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 4 kali jumlah pajak yang terutang.⁷³

E. Pajak dalam Pandangan Ekonomi Islam

1. Pajak Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Pengertian pajak menurut Yusuf Qaradhawi adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada Negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari Negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, social, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh Negara.⁷³

⁷²*Ibid*, h. 17

⁷³Gusfahmi. *Pajak menurut Syareat Rajawali* Pers. Jakarta 2007, h. 32

Gazi Inayah berpendapat bahwa pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah.⁷⁴

Abdul Qadim berpendapat pajak adalah harta yang diwajibkan Allah Swt kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi Baitul Mal tidak ada uang/harta.⁷⁵ Dari berbagai definisi tersebut, nampak bahwa definisi yang dikemukakan Abdul Qadim lebih tepat dan dekat dengan nilai-nilai Syariah, karena di dalam definisi yang dikemukakannya terangkum lima unsur penting pajak menurut syariah, yaitu:

- a. Diwajibkan oleh Allah Swt
- b. Obyeknya harta
- c. Subyeknya kaum muslim yang kaya
- d. Tujuannya untuk membiayai kebutuhan mereka
- e. Diberlakukan karena adanya kondisi darurat (khusus), yang harus segera diatasi oleh Ulil Amri.

⁷⁴Gazi Inayah, *Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak*. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005), diakses dari Staff.UH.ac.id, pada tanggal 9 Agustus 2017 pukul 6:37

⁷⁵Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Pustaka Bandung Bab Dharobah, h. 815

2. Prinsip-Prinsip Pendapatan dan Pengeluaran dalam Perspektif Ekonomi Islam

Sebagaimana halnya penerimaan pengeluaran Negara juga memiliki beberapa prinsip yang harus ditaati Ulil Amri penerimaan Negara yakni sebagai berikut:

- a. Harus adanya nash dari Al-Quran dan Al Hadist yang memerintahkan setiap sumber pendapatan dan pemungutannya
- b. Adanya pemisah sumber penerimaan dari kaum muslimin dan non muslimin
- c. Harus menjamin bahwa hanya golongan yang kaya dan golongan makmur yang mempunyai kelebihan saja yang memikul beban utama.⁷⁶

Adapun prinsip pengeluaran Negara menurut Negara system ekonomi islam adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan penggunaan pengeluaran kekayaan Negara telah ditetapkan langsung oleh Allah SWT.
- b. Apabila ada kewajiban tambahan maka harus digunakan untuk tujuan semula kenapa ia dipungutan
- c. Adanya pemisah antara pengeluaran yang wajib diadakan disaat ada atau tidaknya harta dan pengeluaran yang wajib diadakan hanya disaat adanya harta.
- d. Pengeluaran Negara harus hemat.⁷⁷

⁷⁶Gusfahmi. *Pajak menurut Syariat* Rajawali Pers. Jakarta, 2007, h. 121

⁷⁷*Ibid*

BAB III

LAPORAN PENELITIAN

A. Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung

1. Sejarah Berdirinya Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung

Pada awalnya Dinas Pendapatan provinsi Lampung bernama bagian pajak atau pengasilan daerah tingkat I Lampung, dibentuk bersama dengan terbentuknya Provinsi daerah tingkat I Lampung pada bulan Maret 1949. Kemudian ditingkatkan menjadi Biro penghasilan daerah tingkat I Lampung masa berlakunya sejak tahun 1968 sampai 1969. Selanjutnya dengan dikeluarkannya surat keputusan Gubernur No. Des/0254/B.VII/HK/1991, maka dibentuklah dinas pajak dan pendapatan daerah provinsi Lampung, dengan SK Gubernur No. G/169/DP/HK/1972 tanggal 9 November 1972, maka dibentuklah dinas pajak dan pendapatan daerah provinsi Lampung sebagai dinas daerah tingkat I yang berdiri otonom dengan nama dinas pajak dan pendapatan daerah provinsi Lampung.

Berdasarkan keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Lampung 21 Mei 1980 No. G/102/BH/HK/80 tentang nama dinas pajak dan pendapatan daerah propinsi Lampung diganti menjadi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung. Sejak saat itu juga nama dinas ini diberlakukan diseluruh Indonesia, berikut susunan organisasi dan tata kerjanya berdasarkan surat

keputusan Menteri dalam Negeri No KUPD.7/14/23/78 tanggal 24 Juni 1978.⁷⁸

Khusus untuk daerah tingkat I Lampung. Dasar hukum tentang nama dinas susunan organisasi dan tata kerja dinas ini telah ditetapkan berdasarkan peraturan daerah Provinsi tingkat I Provinsi Lampung No. 14 tahun 1976. Sesuai dengan perkembangan dan kemajuan daerah, maka dengan peraturan daerah No. 17 tahun 2000 tentang struktur organisasi dan tata kerja dinas Provinsi Lampung bagian ke XV dan surat keputusan Gubernur Lampung Nomor 03 tahun 2000 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis dinas (UPTD) pada dinas-dinas Provinsi Lampung, nama dinas pendapatan daerah Provinsi Lampung diganti menjadi Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.

2. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung

a. Visi

Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Untuk Kesejahteraan Masyarakat Kota Bandar Lampung

b. Misi

Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah Kota Bandar Lampung⁷⁹

⁷⁸DISPENDA Kota Bandar Lampung, Rabu 8 Maret 2017

⁷⁹*Ibid*, Dispenda Kota Bandar Lampung



3. Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung

a. Tugas Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung

- 1) Memimpin dan mengkoordinir seluruh usaha dibidang pungutan dan pendapatan daerah berdasarkan ketentuan baik yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
- 2) Mengadakan penelitian dan mengevaluasi tata cara pungutan pajak, retribusi dan pungutan-pungutan lainnya yang telah ada, baik pungutan-pungutan dari pemerintah pusat yang diserahkan kepada pemerintah daerah, guna menciptakan dan atau mencari daerah, system-sistem yang lebih berdaya guna dan berhasil guna.
- 3) Melaksanakan segala usaha dan kegiatan pungutan pengumpulan dan pemasukan pendapatan daerah kedalam kas daerah secara maksimum, baik terhadap sumber pendapatan daerah yang ada maupun dengan penggalian sumber pendapatan daerah yang baru berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota, kepala daerah dan peraturan yang berlaku.
- 4) Mengikuti perkembangan keadaan secara terus menerus dan memperlihatkan akibat atau pengaruh-pengaruh dari keadaan itu terhadap pelaksanaan pokok.
- 5) Mengumpulkan, mengsistematiskan, dan mengolah data-data dan bahan-bahan mengenai tugas pokok dana atau yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok.

- 6) Membuat rancangan-rancangan dan program-program yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pokok.
- 7) Membuat perkiraan keadaan dan memberi saran-saran atau pertimbangan-pertimbangan tepat pada waktunya kepada Walikota, Kepala Daerah sebagai bahan guna menerapkan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan.
- 8) Memberikan saran dan pendapat kepada Walikota, kepala daerah dalam mempertimbangkan besar atau beratnya pengutan-pungutan daerah yang bermacam-macam.
- 9) Mengolah kebijaksanaan tentang pendapatan daerah yang ditetapkan oleh Walikota kepala daerah.
- 10) Menyusun anggaran belanja rutin dan pembangunan Dinas Pendapatan daerah.
- 11) Mempersiapkan ketentuan-ketentuan pelaksanaan dan kebijaksanaan dibidang pengutan-pungutan daerah.
- 12) Menyusun laporan mengenai segala kegiatan dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah.⁸⁰

⁸⁰ Idul Haji Atmoko, *Kepala bidang Dispenda Kota Bandar Lampung*, Rabu 8 Maret 2017

b. Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung

- 1) Perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan, mengolah menelaah penyusunan rumusan kebijaksanaan teknis serta program kerja.
- 2) Pelaksanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk menyelenggarakan pengutan dan pemasukan pendapatan daerah.
- 3) Ketata usahaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan dibidang tata usaha umum, kepegawaian perlengkapan dan keuangan.
- 4) Koordinasi yang meliputi segala usaha dan kegiatan guna mewujudkan kesatuan dan keserasian gerak yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan daerah.
- 5) Pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota kepala daerah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸¹

⁸¹ *Ibid* Dispenda Kota Bandar Lampung, Kamis 9 Maret 2017

B. Pajak Daerah Sumber Penerimaan PAD Kota Bandar Lampung

Tabel 1.2

Target dan Realisasi penerimaan pajak daerah Kota Bandar lampung

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2013	Rp. 264,651,003,114	Rp. 238,115,511,465	89,97 %
2	2014	Rp. 283,050,000,000	Rp. 241,130,668,603	85,19 %
3	2015	Rp. 434,850,000,000	Rp. 253,181,191,950	58,22 %
4	2016	Rp. 519,869,360,000	Rp. 324,667,322,496	62,45 %

Sumber : Data Dispenda Kota Bandar lampung Tahun 2017

Berdasarkan data diatas dapat kita semua ketahui bahwa penerimaan pajak daerah Kota Bandar Lampung yang diperoleh belum mencapai target yang telah ditentukan. Pencapaian tertinggi pada tahun 2013 yang mencapai 89,97 % dan sedangkan yang terendah pada tahun 2015 yang mencapai 58,22%. Melihat adanya kecenderungan dari tahun ke tahun mengalami penurunan PAD dari sector pajaknya, hal ini membuat pembangunan daerah juga kurang optimal karena pajak daerah ini merupakan salah satu sumber PAD yang paling diandalkan.

Berdasarkan hasil wawancara, yang menyebabkan PAD Bandar Lampung turun merupakan banyak WP yang enggan membayar pajak daerah dengan berbagai alasan, padahal pajak daerah sangat menguntungkan kita semua sebagai masyarakat Kota Bandar Lampung, belum tergali semua potensi-potensi yang ada, seperti yang kita ketahui bersama banyak potensi-potensi baru yang bermunculan seperti,

Hotel-hotel baru yang buka, Restoran yang baru beroperasi tapi belum membayar pajaknya, Dispenda akan melakukan pendataan ulang dan menghitung ulang kepada WP agar besaran pajak sesuai dengan kapasitas WP, pada saat ini banyak ditemukan pajak nya tidak sesuai dengan kapasitas WP, dan yang menyebabkan turunnya PAD adanya kebocoran-kebocoran dana, adanya oknum-oknum pemungut pajak tidak jujur dalam melaksanakan kewajibannya hal tersebut dapat kita ketahui bersama, maka dalam hal ini Dispenda melakukan pelatihan-pelatihan dan memberikan insentif kepada petugas pemungut pajak dan memperbaiki serta meningkatkan kualitas Dispenda dalam meningkatkan PADnya.⁸²

Pajak daerah merupakan salah satu sarana pemasukan daerah dari rakyat untuk rakyat dan digunakan untuk pembiayaan pembangunan daerah dan menjadi daerah otonomi yang mandiri sehingga tidak terus menerus mengandalkan pemerintah pusat, sehingga dalam pengenaannya harus memperhatikan prinsip kepastian hukum keadilan dan kesederhanaan serta ditunjang oleh system perpajakan yang memudahkan wajib pajak untuk membayarkan kewajibannya membayar pajak. Prinsip dan system ini dimaksudkan untuk tercapainya Pendapatan Asli daerah khususnya dari sector pajak daerah. Untuk mencapai target penerimaan PAD sector pajak daerah di Kota Bandar Lampung, pemerintah Kota Bandar Lampung telah berusaha semaksimal mungkin agar pencapaian target PAD dapat terealisasi dan sesuai dengan yang kita harapkan.

⁸² Idul Haji Atmoko, *Dispenda* Kota Bandar Lampung, 8 Maret 2017

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah diperlukan fasilitas sumber-sumber pembiayaan, yang salah satunya melalui penghasilan pajak daerah. Pada upaya peningkatan penyediaan fasilitas dari sumber tersebut, antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pembangunan, penyempurnaan dan peningkatan jumlah objek pajak Kota Bandar Lampung, melalui undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah.

Dapat kita semua memahami bagaimana sector perpajakan dapat dikelola, perlu kita semua ketahui bahwa terdapat unsur-unsur yang penting dalam system perpajakan nasional, unsur yang pertama: kebijakan pajak, yaitu kumpulan peraturan hukum yang mengatur bagaimana pajak dipungut dari wajib pajak, berupa perundang-undangan dan berbagai peraturan pelaksanaannya. Unsur yang kedua adalah institusi pemungut pajak, yang bertugas melaksanakan pengumpulan penerimaan Negara dari sector pajak, pemungutan pajak daerah dilakukan oleh Dispenda. Unsur ketiga adalah wajib pajaknya sendiri, yang merupakan subjek atau pembayar pajak. Ketiga elemen ini sangat berpengaruh satu sama lain, dan jika salah salah unsur tidak berjalan dengan baik maka perpajakan nasional maupun perpajakan daerah tidak dapat berjalan dengan baik dan hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam subjek pajak dapat dipahami semua orang atau badan usaha yang memiliki hak di wilayah tertentu dan memperoleh manfaat atas kepemilikannya tersebut. Apabila seseorang atau suatu badan usaha memperoleh keuntungan maka wajib untuk membayarkan pajak daerahnya, dan daerah ataupun Negara juga wajib

untuk menariknya, dan apabila wajib pajak tidak membayarkan kewajibannya maka pemerintah dapat secara paksa mendenda wajib pajak ataupun menariknya secara paksa sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Dapat kita bayangkan jika tidak adanya pajak di Negara atau di daerah yang menganut system otonomi, pajak merupakan penghasilan Negara 70% pendapatan Negara berasal dari pajak yang berasal dari masyarakatnya sendiri begitu juga dengan suatu daerah otonom, bila pajak tidak ada maka roda perekonomian dan pemerintahan tidak berjalan sebagaimana mustinya seperti Sarana Pendidikan, Kesehatan, Keamanan, Jalan Raya, dan fasilitas lainnya, bahkan Pemerintahan pun semuanya bakal jadi Semrawut yang tidak jelas bentuk dan jadinya. Segala sesuatu memang tidak di patok hanya dari dana saja. Akan tetapi dana merupakan bagian penting dalam menjalankan suatu kegiatan terutama roda pemerintahan. Pemerintah tidak bisa mensubsidi sarana dan fasilitas-fasilitas yang dimiliki.

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Peran Dinas Pendapatan Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung

1. Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah dan PAD Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung merupakan Ibu Kota Provinsi Lampung, Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan diperlukan penyediaan fasilitas sumber-sumber pembiayaan, yang salah satunya adalah melalui penghasilan pembayaran Pajak Daerah.

Upaya meningkatkan penyediaan fasilitas dari sumber tersebut, antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan pengelolaan, dan meningkatkan pengawasan di lapangan. Pajak Daerah sangat berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya pada Pemerintah Kota Bandar Lampung. Pajak Daerah menurut Tristi Suryarini adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah Daerah dan pembangunan Daerah.⁸³

Berdasarkan ketentuan diatas maka dapat dipahami bahwa Jenis dan Objek Pajak Daerah Parkir, yaitu :

Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu :

a. Pajak Provinsi, terdiri dari :

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- 4) Pajak Air Permukaan
- 5) Pajak Rokok

b. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari :

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- 7) Pajak Parkir
- 8) Pajak Air Tanah
- 9) Pajak Sarang Burung Walet

⁸³ Azhari Samudra, Perpajakan Di Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 2015, h. 145

10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Jakarta, jenis Pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan Pajak untuk daerah kabupaten /kota.

Berdasarkan ketentuan diatas maka dapat diketahui bahwa objek Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian subjek pajak daerah adalah orang pribadi atau badan yang memang dipaksakan berdasarkan perundang-undangan. Pembayaran Pajak Daerah merupakan bentuk dan bukti perwujudan dalam pembiayaan Negara dan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan untuk tercapainya target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak daerah di Kota Bandar Lampung. Pajak Daerah yang memiliki peranan yang potensial dalam memberikan kontribusi untuk menunjang pembangunan daerah dan peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Aries Djaenuri mendefinisikan Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸⁴ Berdasarkan ketentuan dan definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa PAD adalah sumber pendapatan daerah dengan memanfaatkan potensi daerahnya yang diimplementasikan dalam bentuk pemungutan pajak, retribusi, BUMD, dan pendapatan lain yang sah.

Setelah data terkumpul maka penulis akan menguraikan untuk mengetahui perbandingan antara target dan realisasi yang ditetapkan dengan realisasi yang dicapai. Kota Bandar Lampung memiliki target pendapatan dari sector pajak daerah yang setiap tahunnya mengalami penurunan pendapatan serta tidak terealisasinya target pendapatan daerah terhitung sejak tahun 2013. Sebelum analisa data terlebih dahulu akan kita lihat hasil pengolahan data target dan realisasi penerimaan dari sector pajak daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

⁸⁴Aries Djaenuri, *Hubungan Keuangan Pusat- Daerah, Elemen-Elemen Penting Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012), h.88

Tabel 2.1

**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandar Lampung
Tahun 2013 -2016**

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2013	Rp. 264,651,003,114	Rp. 238,115,511,465	89,97 %
2	2014	Rp. 283,050,000,000	Rp. 241,130,668,603	85,19 %
3	2015	Rp. 434,850,000,000	Rp. 253,181,191,950	58,22 %
4	2016	Rp. 519,869,360,000	Rp. 324,667,322,496	62,45 %

Sumber : Data Dispenda Kota Bandar Lampung Tahun 2017

Berdasarkan data yang disajikan diatas dapat kita ketahui bahwa target dan realisasi Pajak daerah Kota Bandar Lampung mengalami pencapaian realisasi tertinggi adalah pada tahun 2013 yaitu mencapai 89,97 % akan tetapi pada tahun berikutnya mengalami penurunan sebesar 85,19 %, dan tahun berikutnya pun mengalami pemerosotan. Sedangkan untuk realisasi paling kecil sebesar 58,22 % pada tahun 2015 hal tersebut dikarenakan tingkat pendapatan pada tahun 2015 lebih sedikit bila dibandingkan dengan penerimaan pada tahun 2014.

Tabel 2.2**Target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung**

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	2013	418.111.740.815,52	367.280.104.011,00	87,84%
2	2014	495.200.463.391,26	394.646.889.446,59	79,69%
3	2015	769.108.142.606,00	397.547.326.856,39	51,69%
4	2016	757.745.187.987,05	484.663.969.986,84	63,96%
Rata-Rata		2.889.234.075.955,58	2.105.606.882.717,99	73%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Dispenda Kota Bandar Lampung Tahun 2016, Data Diolah.⁸⁵

Tabel diatas merupakan data target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung bahwa realisasi pendapatan tahun 2013 sampai 2016 tidak mencapai target yang sudah ditentukan sehingga terjadi defisit realisasi penerimaan dalam pengelolaan PAD tahun anggaran 2013-2016.

Tabel 3.1

Persentase Kontribusi Pendapatan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2011-2016

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	2013	418.111.740.815,52	Rp.238,115,511,465	0,56 %
2	2014	495.200.463.391,26	Rp.241,130,668,603	0,48 %
3	2015	769.108.142.606,00	Rp.253,181,191,950	0,32 %
4	2016	757.745.187.987,05	Rp.324,667,322,496	0, 42 %

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Dispenda Kota Bandar Lampung Tahun 2016, Data Diolah.⁸⁶

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ *Ibid.*

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa pada tahun 2013 kontribusi Pajak Daerah sebesar 0,56%, pada tahun 2014 kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kota Bandar Lampung sebesar 0,48 %, pada tahun 2015 kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD sebesar 0,32 %, pada tahun 2016 kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD sebesar 0,42%,. Menurut pendapat peneliti penerimaan dari sektor Pajak Daerah masih kurang baik setiap tahunnya masih fluktuatif. Penerimaan Pajak Daerah setiap tahunnya yang tidak mencapai target dan tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Tabel 3.2

Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung

No	Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Laba BUMD	Lain-Lain PAD Yang Sah
1	2013	238.111.511.465	50.651.293.877	8.237.246.269	65.739.811.51
2	2014	241.130.668.603	45.920.496.941	13.206.503.301	89.351.963.991
3	2015	253.181.191.950	46.682.837.194	11.249.897.883	81.159.929.433
4	2016	324.667.322.496	49.653.325.819	10.886.472.354	99.456.849.316

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Dispenda Kota Bandar Lampung Tahun 2017, Data Diolah.

Berdasarkan data yang disajikan diatas dapat kita ketahui data dari beberapa sector antara lain pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMN, dan sumber lain yang sah. Pajak daerah Kota Bandar Lampung mengalami pencapaian realisasi tertinggi adalah pada tahun 2013 yaitu mencapai 89,97 % akan tetapi pada tahun

berikutnya mengalami penurunan sebesar 85,19 %, dan tahun berikutnya pun mengalami pemerosotan. Sedangkan untuk realisasi paling kecil sebesar 58,22 % pada tahun 2015 hal tersebut dikarenakan tingkat pendapatan pada tahun 2015 lebih sedikit bila dibandingkan dengan penerimaan pada tahun 2014.

Dalam penguraian masing-masing target dan realisasi dapat dianalisis seperti pada tahun 2013 mendapatkan perolehan persentase sebesar 89,97 % yang diperoleh dari jumlah realisasi dibagi dengan jumlah yang ditargetkan setelah itu dibagi dengan seratus. Begitu pula pada tahun berikutnya, tahun 2014 diperoleh 85,19 %, tahun 2015 mengalami pemerosotan yang signifikan yaitu sebesar 58,22 %, ditahun berikutnya 2016 mengalami kenaikan sebesar 62,45 %. Hasil target dan realisasi secara keseluruhan belum mencapai target karena diperoleh rata-rata target dan realisasi dari tahun 2013-2016 sebesar 70 % masih jauh dari target yang diharapkan.

Kota Bandar lampung merupakan salah satu Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Wilayah ini memiliki daratan seluas 192,21 km² dengan panjang garis pantai 27,01 km, dan luas desa pesisir 56,57 km². Sepanjang kawasan pesisir Kota Bandar Lampung yang merupakan bagian dari Teluk Lampung, terdapat potensi sumberdaya alam yang belum dikelola secara optimal dalam rangka meningkatkan PAD. Implementasi yang paling mungkin dan cepat dapat diterima adalah bidang pajak karena Kota Bandar Lampung merupakan kota dengan industri sektor jasa yang mendominasi dibandingkan dengan sektor lainnya. Peruntukan pajak selayaknya dapat diterima dan dirasakan oleh

masyarakat, namun disisi lain terjadi pula aktivitas penerimaan pajak dari potensi pajak di daerah memiliki kecenderungan bersifat eksploitatif dan tidak berimplikasi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan, sarana pendidikan dan pelayanan kesehatan.

Sebagai ibukota Provinsi sekaligus kota besar di Provinsi Lampung, kota Bandar Lampung mempunyai PAD yang cukup tinggi sehingga memberikan pengaruh yang nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Pajak Daerah menurut Mardiasmo adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan penjelasan tersebut penerimaan pajak daerah dapat memberikan manfaat untuk masyarakat. Manfaat pajak daerah bagi masyarakat untuk membiayai dan melaksanakan tugas pembangunan maka berkaitan langsung dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Oleh karena dari penerimaan daerah yang didalamnya terdapat PAD yang sumbernya diperoleh khususnya dari pajak daerah dapat memberikan kontribusi terhadap anggaran yang ditetapkan untuk kesejahteraan sosial. Tinggi rendahnya kontribusi PAD dalam bidang bergantung dari optimalisasi penerimaan PAD bidang Pajak Daerah, atau karena kebijakan pemerintah dalam menetapkan proporsi anggaran dalam pembangunan daerah dan juga pengelolaan yang baik

yang dilakukan di lapangan. Oleh karena itu sangat penting peranan Dinas Pendapatan Daerah dalam meningkatkan PAD.

Oleh karena itu menyebabkan tidak terealisasinya target pendapatan Kota Bandar Lampung ialah rendahnya pemahaman wajib pajak tentang pajak. Dan adanya informasi yang diberitakan oleh media Tribun Lampung.com yaitu sebagai berikut :

“Kabar berita yang dikutip di Tribun Lampung news”, Komisi II DPRD Bandar Lampung mensinyalir ada dugaan kebocoran sejumlah pajak pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor rumah makan, restoran dan reklame. Yang menjadi penyebab utama realisasi PAD hingga Oktober ini masih berkisar 50 persen. Menurut Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Bandar Lampung Nu'man Abdi, dugaan kebocoran PAD, didapat setelah pihaknya melakukan cross cek ke sejumlah wajib pajak di lapangan. "Ada beberapa faktor penyebab kebocoran PAD, mulai wajib pajak yang melakukan manipulasi kecurangan, petugas penagihan tidak jujur, sampai permainan antara petugas penagih pajak dan wajib pajak," jelas Nu'man Abdi dalam rapat kerja dengan tiga UPTD Dispenda, Rajabasa, Telukbetung Utara, dan Way Halim, di ruang komisi II DPRD.⁸⁷

Dari wacana di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah Bandar Lampung masih belum dapat terealisasi karena banyak kecurangan-kecurangan yang dilakukan wajib pajak bahkan oleh petugas pajaknya sendiri sehingga potensi-potensi yang ada belum secara maksimal masuk ke pendapatan asli daerah kota Bandar Lampung.

⁸⁷ Inilah penyebab PAD Bandar Lampung baru 50 persen tersedia, <http://Lampung.Tribunnews.com> pada tanggal, 11 Mei 2017, 12:15 WIB

2. Peran Dispenda Dalam Meningkatkan PAD Kota Bandar Lampung

Dalam bab ini penulis akan memaparkan dari hasil penelitian yang diperoleh pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung. Penulis mengolah sumber penelitian yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer penulis diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan kepala bidang pajak daerah Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung, serta data sekunder diperoleh dari data target dan realisasi pendapatan asli daerah Kota Bandar Lampung.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Ahmad Yani merupakan pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana yang berfungsi untuk keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatan yang bersumber dari potensi daerah sendiri.⁸⁸

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.⁸⁹

Berdasarkan ketentuan dan definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan daerah dengan memanfaatkan potensi daerahnya yang diaplikasikan dalam bentuk pemungutan pajak, retribusi, BUMD dan pendapatan lain-lain yang sah.

⁸⁸ Ahmad yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), h. 51-52

⁸⁹ Abdul Halim, Muhammad Syam Kusufi, *Lok.Cit*, h. 101.

Manfaat pajak bagi masyarakat Bandar Lampung antara lain mencakup kesejahteraan dibidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, meningkatkan taraf hidup masyarakat serta meningkatkan atau perbaikan infrastruktur Kota Bandar Lampung. Peran Dispenda sangatlah penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, karena di Kota Bandar Lampung terdapat banyak potensi-potensi yang dikelola secara rutin oleh masyarakat atau organisasi dan menjadi pendapatan daerah.

Selain itu menurut Yasyin, peranan adalah sesuatu yang diperbuat, sesuatu tugas, sesuatu hal yang pengaruhnya pada suatu peristiwa. Sedangkan menurut Soekanto, peran adalah segala sesuatu oleh seseorang atau kelompok orang dalam melakukan suatu kegiatan karena kedudukan yang dimilikinya. Dalam hubungan ini peranan menyangkut tiga hal yaitu:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat atau organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai individu yang penting dalam struktur sosial masyarakat.⁹⁰

⁹⁰Soerjono Soekarto, *Tuntunan Dakwah dan Pembinaan Pribadi*, (Jakarta : Pustaka Amini, 1983), Cet. Ke-2, h. 15.

Dispenda mempunyai peranan dan wewenang yang sangat penting serta harus mempunyai cara-cara yang jitu agar dapat mengoptimalisasikan pendapatan daerahnya, dalam upaya meningkatkan kemampuan penerimaan daerah, khususnya penerimaan dalam pendapatan asli daerah harus dilaksanakan secara terus menerus oleh semua pihak dalam pemerintah daerah, agar pendapatan asli daerah tersebut terus meningkat. pemerintah diharapkan dapat meningkatkan PAD untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat, sehingga meningkatkan otonomi dan keluasaan daerah. Langkah penting yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah adalah menghitung potensi PAD yang dimiliki daerah.

Mengoptimalisasi PAD akan berimplikasi pada peningkatan pungutan pajak daerah retribusi daerah, karena penyumbang terbesar PAD dalam hal ini upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah:

- a. Menjadikan PBB sebagai pajak daerah, sehingga pemerintah akan mendapatkan pendapatan pajak daerah yang besar dan nantinya pemerintah daerah tidak perlu lagi mengurus pajak-pajak yang kecil nilainya.
- b. Pemerintah perlu memperbaiki system perpajakan daerah, maka daerah dapat menikmati pendapatan dari sektor pajak yang cukup besar.

- c. Optimalisasi peran BUMD dan BUMN. Peran investasi dan perusahaan milik Negara/daerah diharapkan dapat berfungsi sebagai pemacu utama pertumbuhan daerah.

Dispenda harus tegas dalam memungut pajak daerah kepada wajib pajak, bila pemasukan daerah memenuhi target dalam pelaksanaannya maka masyarakat pula yang akan merasakan dampaknya, seperti perbaikan jalan yang rusak atau menciptakan tempat umum yang nyaman bagi masyarakatnya perbaikan atau peningkatan sarana dan prasarana. Dispenda juga harus memiliki sifat yang transparan kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalah pahaman. Sifat yang transparan ini guna untuk masyarakat ketahui bawah pajak yang mereka setorkan digunakan yang sebagaimana mustinya yang telah di atur dalam UU, seperti membangun atau memperbaiki infrastruktur serta meningkatkan sarana dan prasarana untuk membuat masyarakat merasa nyaman dengan fasilitas yang disediakan pemerintah, dari rakyat dan untuk rakyat.

Berkenaan dengan peranan Dispenda dalam pemungutan pajak daerah dan, sebagaimana dijelaskan Bapak Ir.Idul Haji Atmoko selaku kepala bidang dispenda Pengendalian Dinas Pendapatan mengemukakan bahwa :

“Dalam hal ini Dinas Pendapatan menyiapkan rencana-rencana yang akan dilakukan untuk mencapai target pajak daerah yang telah ditetapkan, melalui rencana dan program-program yang bisa menarik minat masyarakat untuk membayar pajak baik itu secara langsung maupun tidak. Dalam menjalankan

rencana-rencana tersebut Dinas Pendapatan bekerja sama dengan pihak-pihak seperti Kecamatan dan Kelurahan yang ada di Bandar Lampung”⁹¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, untuk melaksanakan peranan Dispenda dalam pemungutan Pajak daerah dengan merencanakan program-program yang baik untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Dalam menjalankan rencana-rencana Dinas Pendapatan bekerja sama dengan pihak-pihak lain seperti Kecamatan dan Kelurahan. Dalam hal ini Pihak Kecamatan dan Kelurahan dilibatkan dalam kegiatan pendataan terhadap objek pajak di wilayah masing-masing.

Upaya yang dilakukan Dispenda Kota Bandar Lampung untuk pengembangan, peningkatan, dan penggalian sumber-sumber pendapatan asli daerah antara lain :

a. Intensifikasi dan ekstensifikasi.

Kegiatan intensifikasi adalah kegiatan persuasive untuk menggali potensi yang sesungguhnya dari Wajib Pajak. Sedangkan kegiatan ekstensifikasi adalah untuk menjaring wajib pajak baru dari potensi pajak daerah seperti hotel-hotel yang baru buka atau restoran-restoran yang baru buka yang berada di Kota Bandar Lampung. Sehingga dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah. Pada poin intensifikasi, daerah harus berupaya

⁹¹ Bpk. Ir.Idul Haji Atmoko, kepala bidang Dispenda Kota Bandar Lampung Rabu 8 Maret 2017

mencegah seminimal mungkin tingkat kebocoran yang terjadi sebelum disetor ke kas daerah. Sementara pada ekstensifikasi, daerah perlu menggali sumber-sumber pendapatan yang baru melalui pengembangan, perluasan pelayanan, dan peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkannya.

Berkenaan dengan Kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sebagaimana dijelaskan Bapak Ir.Idul Haji Atmoko selaku kepala bidang dispenda Pengendalian Dinas Pendapatan mengemukakan bahwa :

“contoh intensifikasi pajak, maksudnya untuk meningkatkan pajak daerah dengan mengintensifkan segi perundang-undangnya, meningkatkan kapasitas hukumnya, mengintensifkan peraturan pelaksanaannya, meningkatkan mutu aparatur, dan meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pematuhan peraturan perpajakan dan meningkatkan pengawasan melekat sumber daya manusia yang ada di kantor ini ditekankan untuk mengutamakan pelayanan dan pengawasan dalam mengelola pendapatan asli daerah. Seringkali terjadi data objek pajak yang tidak sesuai dengan data yang dihimpun di dinas pendapatan daerah. Intensifikasi yang dilakukan adalah memberikan pelatihan bimbingan teknis kepada sumber daya manusia yang ada di dispenda ini. Sejauh ini kami melakukan program

intensifikasi PAD melalui monitoring pemungutan, penagihan melakukan penyuluhan, sosialisasi dalam upaya meningkatkan kesadaran wajib pajak”⁹²

“Pelayanan yang dilakukan bukan hanya pada intensifikasi pungutan tapi juga pada ekstensifikasi. Sejauh ini yang rutin kami lakukan adalah memberikan pelayanan pasar berupa rehabilitasi/perbaikan pada pasar-pasar di setiap kecamatan yang ada, restaurant-restaurant yang baru buka, hotel-hotel dan membenahi sarana dan prasarana yang ada. Ini merupakan tanggung jawab dari pemerintah daerah untuk menyediakan tempat dan memfasilitasi objek pungutan yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Namun dalam hal ekstensifikasi kami takut terlibat dalam hal pemungutannya karena itu merupakan kewenangan yang dimiliki dispenda untuk menciptakan objek pajak atau retribusi baru maupun merubah tarif pungutan.”⁹³

Berdasarkan pernyataan kepala bidang dispenda bahwa kinerja dari sumber daya manusia juga sangat berpengaruh dalam rangka peningkatan PAD, maka dari itu ditekankan kepada seluruh aparat untuk ketat dalam melakukan pengawasan pemutakhiran data objek pajak maupun subjek pajak. Adapun pengawasan yang dilakukan oleh aparat dinas pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian penghimpunan data objek/subjek pajak sampai proses penagihan.

⁹²Bpk. Ir.Idul Haji Atmoko, kepala bidang Dispenda Kota Bandar Lampung Rabu 8 Maret 2017

⁹³Bpk. Ir.Idul Haji Atmoko, kepala bidang Dispenda Kota Bandar Lampung Rabu 8 Maret 2017

- b. Melaksanakan penatausahaan restitusi, administrasi kelebihan pembayaran pajak dalam bentuk uang tunai atau pemindah bukuan.
- c. Melaksanakan kegiatan penyuluhan terhadap Wajib Pajak.
- d. Melaksanakan penerbitan surat teguran, surat tagihan dan surat ketetapan pajak kurang bayar dan surat pelaksanaan penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) dan proses penegakan aturan perpajakan lainnya.

Selain pengawasan juga harus memberikan proses pelayanan yang baik agar proses pemungutan yang dilakukan dapat maksimal dan mampu meningkatkan PAD. Adapun pelayanan yang dimaksud sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak dalam hal pengajuan pendaftaran objek pajak, pembetulan SPPT, pembatalan SPPT, keberatan, pengajuan pengurangan, restitusi, konsultasi dan pengurangan denda.
- b. Memberikan pelayanan konsultasi untuk membantu segala permasalahan Wajib Pajak berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakannya
- c. Meneliti kelengkapan berkas yang diajukan untuk Wajib Pajak, merekam, mencetak bukti dokumen (tanda terima dokumen), meneruskan berkas ke masing-masing seksi/ fungsi, menyerahkan SPPT ke Wajib Pajak.

b. Peningkatan kemampuan aparatur melalui pendidikan dan latihan agar memperoleh tenaga- tenaga yang professional.

Kegiatan peningkatan penerimaan pajak daerah juga dilakukan dengan memberikan pembinaan aparatur/pelatihan melalui kegiatan in house training, yakni pelatihan yang dilakukan dikantor sendiri untuk meningkatkan pemahaman aparat dispenda sehingga akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kota Bandar Lampung, yang pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah. Pembinaan aparatur ini meliputi peningkatan kemampuan teknis seperti pemeriksaan pajak, penilaian pajak daerah, customer service maupun kemampuan mengenai pajak daerah secara umum.⁹⁴

“Menurut Bapak Ir. Haji Dalam meningkatkan pelayanan ke pada masyarakat khususnya di dispenda, maka diperlukan sumber daya yang handal dan professional. Pengembangan aparatur dimaksudkan agar dapat memperbaiki kinerja pegawai yang bekerja secara tidak memuaskan karena kekurangan keterampilan. pengembangan apartaur SDM dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan merupakan cara untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan keahlian, mutu, ketrampilan, dan pengabdian yang terencana dan berkesinambungan untuk menjadi aparatur yang professional.”⁹⁵

⁹⁴ *Dispenda*, Kota Bandar Lampung, Rabu 8 Maret 2017

⁹⁵ Bpk. Ir. Idul Haji Atmoko, kepala bidang Dispenda Kota Bandar Lampung Senin 17 Juli

c. Pemantauan dan Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak secara Berkala.

Terhadap wajib pajak-wajib pajak yang ada, khususnya untuk wajib pajak dengan pembayaran self assesment, dilakukan pemantauan dan pemeriksaan secara berkala. Pemeriksaan pajak daerah terhadap wajib pajak dimaksudkan untuk menguji sekaligus meningkatkan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan daerah masing-masing wajib pajak. Diharapkan melalui kegiatan Pemeriksaan Pajak Daerah ini para Wajib Pajak akan membayar tepat waktu dan tepat jumlah sehingga dapat meningkatkan Pajak Daerah secara signifikan.

“Menurut Bpk Idul Haji, Pemeriksaan secara berkala adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kegunaan untuk Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak, pencocokan data dan/atau alat keterangan, Wajib Pajak mengajukan keberatan, Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.”⁹⁶

d. Sosialisasi Pajak Daerah kepada masyarakat Kota Bandar Lampung secara berkala.

Sosialisasi Pajak Daerah oleh Dispenda diberikan untuk para wajib pajak, para aparatur pemerintah di lapangan serta masyarakat Kota Bandar Lampung secara umum. Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pajak daerah, sehingga kesadarannya

⁹⁶Bpk. Ir.Idul Haji Atmoko, kepala bidang Dispenda Kota Bandar Lampung Senin 17 Juli 2017

membayar pajak akan bertambah dan pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah.

“kami rutin melakukan sosialisasi melalui media cetak seperti surat kabar, membuat leaflet/brosur, memasang papan himbauan pajak di tempat-tempat umum untuk mengingatkan masyarakat membayar pajak. Cara lain yang kami buat adalah membuat pojok pajak di setiap kelurahan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat dan Alhamdulillah mendapat respon baik dari masyarakat dengan menyertakan lurah untuk berpartisipasi membantu pelaksanaannya”⁹⁷

Gambar 1.1

Surat Kabar Mengenai Pajak dan Sosialisasi Tentang Pajak Daerah



(Sumber: Dinas Pendapatan Daerah, 2016)

e. Memberikan insentif kepada petugas pemungut pajak

Insentif diberikan untuk meningkatkan semangat kerja seseorang, karena semangat kerja seseorang itu dipengaruhi oleh motivasi yang mendasari pekerjaan yang dilakukan. Jika motivasi yang dimiliki oleh seseorang itu sesuai dengan keinginannya maka semangat kerja akan

⁹⁷Bpk. Ir.Idul Haji Atmoko, kepala bidang Dispenda Kota Bandar Lampung Senin 17 Juli 2017

meningkat, tetapi jika motivasi yang dimiliki seseorang kurang sesuai dengan harapan yang dinginkannya maka semangat kerja seseorang akan menurun. Salah satu cara yang dilakukan untuk meningkatkan semangat kerja yang dimiliki seseorang adalah dengan memberikan Insentif.

“Intensif adalah pemberian sesuatu kepada karyawan atau kerja berupa uang atau sesuatu yang tujuannya adalah untuk meningkatkan semangat kerja. Kami akan memberikan sesuatu agar pegawai pemungut pajak meningkat semangat kerja nya, dan pegawai yang kerjanya baik, dan jujur akan memberikan insetif kepada mereka.”⁹⁸

f. Mengupayakan langkah-langkah ke arah pelaksanaan rasionalisasi bidang pajak daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Misalnya, dengan menetapkan pembagian presentase hasil pungutan pajak daerah antara provinsi dan kabupaten/kota, agar keseragaman dan keadilan dapat dipenuhi dalam rangka mewujudkan titik berat otonomi kepada kabupaten/kota. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat memperkecil ketergantungan daerah terhadap sumber dari pemerintah pusat. Peningkatan PAD dapat dilakukan melalui peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dengan cara pemungutan intensifikasi dan ekstensifikasi. Optimalisasi sumber pendaptan asli daerah (PAD) perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah

⁹⁸Bpk. Ir.Idul Haji Atmoko, kepala bidang Dispenda Kota Bandar Lampung Rabu 8 Maret 2017

untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan.

“Menurut Bapak Ir. Idul Haji Intensifikasi adalah pengungkapan pelaporan pajak yang tidak benar dan tidak dilakukan oleh wajib pajak. Optimalisasi sumber-sumber penerimaan PAD perlu dilakukan untuk mewujudkan kemandirian keuangan daerah. Untuk itu diperlukan intensifikasi terhadap pajak daerah, intensifikasi pajak dan retribusi daerah diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah. Intensifikasi pajak daerah dapat memaksimalkan berbagai kebijakan yang selama ini telah dilaksanakan, melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas penerimaan pajak daerah, perbaikan sistem administrasi atau peningkatan tarif pajak, dan memperbaiki sistem perpajakan daerah”⁹⁹

Upaya intensifikasi akan mencakup aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan, dan aspek personalianya, yang pelaksanaannya melalui kegiatan sebagai berikut:

- 1) Menyesuaikan/memperbaiki aspek kelembagaan/organisasi pengelola pendapatan asli daerah (dinas pendapatan daerah), berikut perangkatnya sesuai dengan kebutuhan yang terus berkembang, yaitu dengan cara menerapkan secara optimal sistem dan prosedur administrasi pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan pendapatan lain-lain .
- 2) Memberikan dampak ke arah peningkatan pendapatan asli daerah, karena sistem ini dapat mendorong terciptanya:

⁹⁹Bpk. Ir.Idul Haji Atmoko, kepala bidang Dispenda Kota Bandar Lampung Rabu 8 Maret 2017

- a) Peningkatan jumlah wajib pajak dan wajib retribusi daerah.
 - b) Peningkatan cara-cara penetapan pajak dan retribusi.
 - c) Peningkatan pemungutan pajak dan retribusi dalam jumlah yang benar dan tepat pada waktunya.
- 3) Peningkatan sistem pembukuan, sehingga memudahkan dalam hal pencarian data tunggakan pajak maupun retribusi yang pada akhirnya dapat mempermudah penagihannya.
- 4) Memperbaiki/menyesuaikan aspek ketatalaksanaan, baik administrasi maupun operasional yang meliputi:
- a) Penyesuaian/penyempurnaan administrasi pungutan.
 - b) Penyesuaian tarif
 - c) Penyesuaian sistem pelaksanaan pungutan.
- 5) Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian yang meliputi:
- a) Pengawasan dan pengendalian yuridis
 - b) Pengawasan dan pengendalian teknis
 - c) Pengawasan dan pengendalian penata usahaaan
- 6) Peningkatan sumber daya manusia pengelola PAD dengan cara meningkatkan mutu sumber daya manusia/aparatur pengelola pendapatan daerah dapat dilakukan dengan mengikut sertakan aparatnya dalam Kursus Keuangan Daerah (KKD), juga program-program pendidikan dan latihan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.

- 7) Meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat membayar pajak dan retribusi. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat dilakukan adalah melakukan intensifikasi terhadap objek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada, seperti melakukan intensifikasi terhadap pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan melakukan efektivitas dan efisiensi sumber atau objek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas PAD tanpa harus melakukan perluasan sumber atau objek pendapatan daerah yang baru yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang.

Secara umum, upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a) Memperluas basis penerimaan tindakan.

Hal ini dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu: mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.

b) Memperkuat proses pemungutan.

Upaya yang dilakukan ini dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan perda, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM.

c) Meningkatkan pengawasan.

Hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.

d) Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik.

Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.



Bahwa usaha- usaha intensifikasi dalam hal pajak dapat dilakuakn sebagai berikut:

- a) Menetapkan target atau wajib setor minimum (wamin) kepada unit dinas pendapatan di daerah untuk setiap jenis pajak dan retribusi daerah
- b) Memperluas jumlah wajib pajak
- c) Berusaha memperpendek jarak antara wajib pajak dengan fiskus
- d) Meningkatkan kemampuan aparatur dinas
- e) Mengadakan koordinasi secara internal dan eksternal baik vertical maupun horizontal

- f) Selalu meninjau dan mengajukan perubahan tarif yang dianggap kurang memadai dengan kenyataan.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang sangat potensial. Peningkatan penerimaan PAD adalah merupakan suatu kebijakan yang harus ditempuh oleh pemerintah kabupaten/kota di era otonomi daerah sekarang ini. Pemerintah kabupaten/kota harus berupaya menggali sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan daerahnya, tidak hanya mengharapkan bantuan atau subsidi dari pemerintah pusat. Salah satu upaya yang dapat ditempuh oleh pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan PAD adalah dengan melakukan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah.

“Menurut Idul Haji Ekstensifikasi adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan Negara yang ditempuh melalui perluasan, baik objek maupun subjek pajak, dan untuk menjaring wajib pajak baru dari potensi-potensi daerah seperti hotel-hotel yang baru buka atau restoran-restoran yang baru buka dan berada di Kota Bandar Lampung sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah. Berdasarkan peraturan baru yang ada, pemerintah kabupaten/kota dengan Peraturan Daerah dimungkinkan untuk menambah jenis pajak lain diluar yang telah diatur dalam Undang- undang Nomor 34 tahun 2000”¹⁰⁰

¹⁰⁰Bpk. Ir.Idul Haji Atmoko, kepala bidang Dispenda Kota Bandar Lampung Rabu 8 Maret 2017

Upaya ekstensifikasi atas sumber-sumber penerimaan pajak daerah harus didasarkan kepada kriteria- kriteria yang telah diatur dalam pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 34 tahun 2000, dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Bersifat pajak dan bukan Retribusi.
- 2) Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- 3) Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- 4) Objek pajak bukan merupakan objek pajak Provinsi dan/atau objek pajak Pusat.
- 5) Potensinya memadai.
- 6) Tidak memberikan dampak ekonomi yang negative.
- 7) Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.
- 8) Menjaga kelestarian lingkungan.

Ekstensifikasi merupakan salah satu kebijakan yang harus ditempuh oleh pemerintah kabupaten/kota dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui penciptaan sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah baru, karena pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber penerimaan yang memberikan kontribusi paling besar bagi pendapatan asli daerah. Salah satu kebijakan dalam upaya ekstensifikasi

sumber penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah yang sangat rasional dan tidak menyengsarakan masyarakat adalah kebijakan di bidang investasi.

“Menurut Idul Haji Kehadiran investor dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam bentuk pajak”¹⁰¹

Kegiatan investasi dapat memberikan kontribusi yang sangat besar, khususnya dalam upaya peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, maupun dalam upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada umumnya. Kebijakan-kebijakan yang dapat ditempuh. Menciptakan daya tarik dan iklim yang kondusif bagi investor Bagi Investor lokal maupun asing untuk menanamkan/menginvestasikan modalnya di kota/kabupaten.

- a. Memberikan kemudahan bagi investor bagi investor lokal maupun investor asing untuk menanamkan/menginvestasikan modalnya di daerah dengan menghilangkan birokrasi yang berbelit- belit.
- b. Peningkatan obyek pajak dan retribusi. Yaitu upaya yang dilakukan oleh pemda untuk menggali dan mendata lagi obyek- obyek pajak dan retribusi di daerah yang bisa dikenakan pajak maupun retribusi daerah. Untuk mewujudkan kemandirian keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, upaya-upaya ekstensifikasi baik terhadap pajak daerah maupun

¹⁰¹Bpk. Ir.Idul Haji Atmoko, kepala bidang Dispenda Kota Bandar Lampung Senin 17 Juli2017

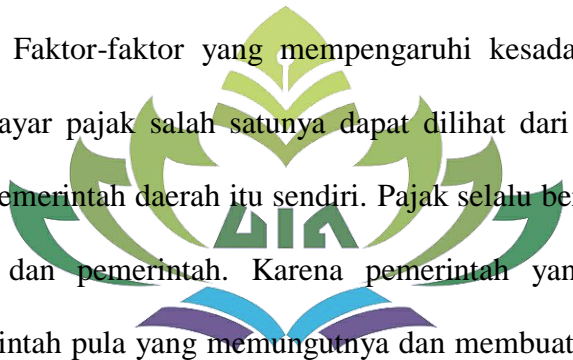
retribusi daerah, adalah menjadi salah satu alternatif untuk memperbesar Pendapatan Asli Daerah.

2. Peran Dispenda Kota Bandar Lampung Dalam Menyadarkan Wajib Pajak

Berbicara mengenai sadar dan kesadaran yang kaitannya dengan masyarakat adalah kesadaran kehendak dan kesadaran hukum. Sadar diartikan merasa tahu, ingat kepada keadaan yang sebelumnya, atau ingat akan keadaan dirinya. Menurut Freud kesadaran diartikan keadaan tahu, mengerti dan merasa. Selanjutnya sadar didefinisikan sebagai sikap atau perilaku untuk mengetahui atau mengerti, taat dan patuh kepada peraturan dan ketentuan perundangan yang ada, juga merupakan sikap atau perilaku mengetahui dan mengerti, taat patuh pada adat istiadat dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Masyarakat adalah kumpulan orang yang ada pada waktu tertentu, berada bersama-sama dengan tujuan yang sama dan di tempat yang sama.

Berdasarkan definisi di atas maka kesadaran masyarakat di artikan sebagai keadaan tahu, mengerti, dan mampu oleh masyarakat untuk menyeimbangkan, menyelaraskan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundangan yang didukung oleh adanya etika dan moral masyarakat tersebut. Adanya kesadaran masyarakat itu untuk mendorong keinginan yang kuat untuk meningkatkan dan mengembangkan kepentingan bersama guna mencapai kehidupan yang lebih baik.

“Menurut Bapak Ir. Idul Haji, Tingkat kesadaran masyarakat mempengaruhi bagaimana kegairahan mereka untuk membayar Pajak Daerah, dengan kata lain bahwa kesadaran masyarakat mempunyai peran yang sangat penting karena akan mendorong kerelaan mereka dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Disamping kemampuan masyarakat ada dalam membayar pajak namun tidak didukung dengan kesadaran yang tinggi maka masyarakat akan tetap enggan untuk membayar pajak. Berkaitan dengan masalah pembayaran Pajak Daerah, maka dalam memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat perlu lebih dikaitkan dengan gambaran kehidupan masyarakat yang beraneka ragam. Keanekaragaman itu berhubungan dengan faktor golongan sosial, politik atau ekonomi, serta tingkat pendidikan, sifat dan bentuk pekerjaan yang dilakukan.”¹⁰²



Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam membayar pajak salah satunya dapat dilihat dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu sendiri. Pajak selalu berhubungan antara wajib pajak dan pemerintah. Karena pemerintah yang mengadakan, maka pemerintah pula yang memungutnya dan membuat ketentuan wajib pajak. Dilihat dari segi upaya pemerintah yang disebutkan pada bab sebelumnya selaku pimpinan suatu daerah sudah dapat membantu dalam menyadarkan masyarakat akan wajib pajak. Kesadaran masyarakat membayar pajak tidak hanya memunculkan sikap patuh, taat dan disiplin semata. Semakin maju masyarakat dan pemerintahannya, maka semakin tinggi kesadaran masyarakat untuk membayar pajaknya.

¹⁰²Bpk. Ir.Idul Haji Atmoko, kepala bidang Dispenda Kota Bandar Lampung Rabu 8 Maret 2017

“Namun disamping faktor peluang yang dimiliki oleh pemerintah dalam menjalankan upaya-upayanya ada faktor lain yang dapat menghambat pemerintah dalam menjalankan upaya-upayanya seperti adanya daerah yang masih sulit untuk di datangi, kurangnya kerjasama dengan instansi lain (pihak ketiga) guna mendapatkan data mengenai potensi wajib pajak, adanya prasangka negatif dari masyarakat kepada petugas pajak”¹⁰³

Faktor penghambat dispenda dalam upaya meningkatkan Peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD) adalah sebagai berikut:

a. Pemahaman Masyarakat yang Kurang

Kurangnya pemahaman masyarakat sebagai subjek pajak/subjek retribusi tentang peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Masyarakat yang dikatakan sebagai wajib pajak seharusnya lebih memberikan kontribusi besar pernyataan yang diberikan Kepala bidang dispenda:

“Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi, namun kurangnya pemahaman masyarakat ini terus saja menjadi faktor penghambat dalam peningkatan PAD. Masyarakat cenderung ingin didatangi untuk melakukan proses penagihan, padahal kami telah jelaskan tentang prosedur pemungutannya yaitu bisa melalui camat, lurah atau bisa langsung ke bank yang sudah di tunjuk tiap kecamatan”.¹⁰⁴

¹⁰³Bpk. Ir.Idul Haji Atmoko, kepala bidang Dispenda Kota Bandar Lampung Rabu 8 Maret 2017

¹⁰⁴Bpk. Ir.Idul Haji Atmoko, kepala bidang Dispenda Kota Bandar Lampung Senin 17 Juli 2017

Berdasarkan hasil wawancara diatas yang mengatakan bahwa masih banyaknya masyarakat yang kurang paham tentang peraturan daerah yang mengatur pajak daerah dan retribusi. Sebagai wajib pajak dan wajib retribusi masyarakat wajib mengetahui peraturan yang mengatur pajak dan retribusi daerah agar lebih mempermudah proses penagihan.

Masyarakat wajib pajak memiliki tingkat pendidikan rata-rata dan sulit untuk melakukan komunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat terus dilakukan dengan memperkuat pemahaman masyarakat di peraturan daerah dan perundang-undangan yang mengatur pajak dan retribusi daerah. Seperti yang dikatakan oleh Kepala bidang dispenda bahwa:

“Pernah beberapa kali kami menangani kasus masyarakat yang tidak terima dengan tarif yang kami berikan. Kami sudah jelaskan dan memberikan pemahaman kepada beliau bahwa ini sudah ketentuannya. Maka dari itu faktor penghambat yang sangat sering kami jumpai adalah partisipasi masyarakat yang kadang acuh jika ingin diberikan sosialisasi secara langsung terkait Pajak daerah kepada mereka selaku wajib pajak dan wajib retribusi”.¹⁰⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa masyarakat yang kadang acuh jika pihak dari dinas pendapatan daerah melakukan penyuluhan dan sosialisasi secara langsung. Padahal kegiatan ini sangat menunjang peningkatan pendapatan asli daerah. Seperti yang dikatakan oleh Kepala bidang dinas pendapatan daerah bahwa:

¹⁰⁵Bpk. Ir.Idul Haji Atmoko, kepala bidang Dispenda Kota Bandar Lampung Senin 17 Juli 2017

“Kenapa masyarakat dikatakan sebagai faktor penghambat karena secara peraturan masyarakatlah sebagai wajib pajak dan retribusi yang seharusnya tau kewajibannya masing-masing. Penerimaan yang saya terima kadang tidak mencapai target karena masyarakat kadang malas untuk datang ke kantor menyettor, namun kami telah permudah dengan adanya tim petugas pemungut untuk melakukan pembayaran melalui petugas tersebut, ataupun bisa melalui transfer langsung ke kas daerah dan pelaporannya secara langsung di audit”.¹⁰⁶

Melihat hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakatlah penunjang utama dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Dibutuhkannya kesadaran masyarakat tentang tugas dan tanggung jawab wajib pajak dan wajib retribusi untuk tidak melakukan penunggakan atau pengendapan dana yang dapat menghambat pendapatan asli daerah mengalami peningkatan. Penyebab pajak daerah tidak pernah terealisasi karena mulai wajib pajak yang melakukan manipulasi kecurangan, petugas penagihan tidak jujur, sampai permainan antara petugas penagih pajak dan wajib pajak, masih banyak kecurangan-kecurangan yang dilakukan wajib pajak bahkan oleh petugas pajaknya sendiri sehingga potensi-potensi yang ada belum secara maksimal masuk ke pendapatan asli daerah kota Bandar Lampung. Contohnya wpmemiliki kendaraan bermotor dan sudah 3 tahun lamanya anda tidak membayarkan pajak motor tersebut. Biasanya setiap keterlambatan akan dikenakan biaya denda, namun karena adanya pemutihan

¹⁰⁶Bpk. Ir.Idul Haji Atmoko, kepala bidang Dispenda Kota Bandar Lampung Rabu 8 Maret 2017

tersebut maka anda hanya membayarkan pajak pokok saja dan tidak perlu membayar denda. Jadi, solusi yang dilakukan oleh Pemerintah dengan pemutihan pajak kendaraan, pemutihan pajak adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh negara guna menertibkan para wajib pajak yang telah lama tidak membayarkan kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan dengan cara tidak atau menghapus beban denda keterlambatan pembayaran selama periode tertentu.

b. Petugas Penagih yang Kurang

Peningkatan pendapatan asli daerah mengikutsertakan banyak aspek dalam proses pemungutan atau penagihan. Dalam proses pembayaran atau penagihan terdapat kolektor yang bertugas melakukan penagihan. Kolektor ditunjuk langsung oleh Walikota di setiap kecamatan yang mendaftar wajib pajak. Kurangnya petugas penagih atau kolektor dapat menjadi faktor penghambat peningkatan pendapatan asli daerah di kota Bandar Lampung, senada dengan pernyataan Kepala bidang bahwa:

“Petugas penagihan di dinas pendapatan daerah masih kurang. Walikota telah menunjuk langsung di setiap kecamatan untuk menjadi petugas penagih atau kolektor, namun beberapa diantaranya kadang melakukan kecurangan dalam pemungutan jadi diberhentikan. Sangat sulit menunjuk kolektor dengan kualifikasi yang baik. Jika terjadi seperti ini penagihan diambil alih oleh camat atau lurah untuk tidak menghambat pungutan yang masuk ke kas daerah”.¹⁰⁷

¹⁰⁷Bpk. Ir.Idul Haji Atmoko, kepala bidang Dispenda Kota Bandar Lampung Senin 17 Juli 2017

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat lainnya adalah kolektor atau petugas penagih. Wajib Pajak dapat membayar Pajak daerah melalui tempat-tempat pembayaran yang telah ditunjuk, baik pembayaran secara konvensional maupun pembayaran secara elektronik. Ataupun membayar melalui petugas pemungut Pajak yang ditunjuk oleh Walikota. Perlu dicermati dan diingat bahwa selama ini terdapat banyak petugas pungut yang berlaku curang, yaitu tidak menyetorkan hasil pemungutannya ke tempat pembayaran, sehingga penerimaan tersebut tidak masuk ke kas Negara ataupun kas daerah. Seperti yang dikatakan oleh Sekertaris Dispenda bahwa:

“Banyak kolektor yang sama sekali tidak berkompeten ditunjuk oleh walikota untuk melakukan tugas penagihan. Tugas penagihan yang kolektor lakukan kadang dimanfaatkan dengan berlaku curang tidak menyetorkan pada pihak bank ataupun pihak pengelola pajak daerah. Hambatannya lagi kita kurang menganalisis petugas pemungut yang layak dijadikan kolektor, dengan melihat latar pendidikan mereka, lingkungan atau bahkan pengaruh yang diberikan di lingkungannya”¹⁰⁸.

Perilaku kolektor nakal sangat merugikan wajib pajak dan merugikan daerah. Apabila Wajib Pajak terlambat membayar pajak, maka akan dikenakan denda sebesar 2% per bulan, untuk selamalamanya 24 bulan. Apabila setelah jatuh tempo pajak tidak dibayar, maka dapat dilakukan penagihan aktif setelah sebelumnya diterbitkan surat teguran/ surat peringatan atau surat yang sejenis. Penagihan aktif dilakukan dengan menerbitkan surat paksa yang kemudian dapat dilakukan penyitaan, pelelangan, dan sebagainya.

¹⁰⁸Bpk. Ir.Idul Haji Atmoko, kepala bidang Dispenda Kota Bandar Lampung Senin 17 Juli 2017

Kegiatan penagihan aktif memerlukan seorang petugas khusus, yakni juru sita pajak. Oleh karena itu, pemda juga perlu menyiapkan SDM juru sita ini, selain menyiapkan petugas fungsional penilai daerah pajak dan *operator consule*, petugas pajak juga perlu ditambah. Solusi untuk Pemerintah agar merekrut petugas pajak tambahan dengan penambahan petugas pajak diharapkan bisa menambah kinerja dari dispenda sendiri.

Pemerintah daerah telah melakukan upaya dalam rangka pencapaian target penerimaan PAD dibidang pajak daerah yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembiayaan pembangunan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya menurut peraturan perundang-undangan Bandar Lampung telah mengadakan upaya dalam menyadarkan wajib pajak¹⁰⁹

c. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat yang berada di Kota Bandar Lampung

Kesadaran membayar pajak datangya dari diri sendiri, maka menanamkan pengertian dan pemahaman tentang pajak bisa diawali dari lingkungan keluarga sendiri yang terdekat, melebar kepada tetangga, lalu dalam masyarakat melalui sosialisasi. Dengan banyaknya informasi yang diterima oleh masyarakat, maka dapat secara perlahan merubah pemikiran dan sikap masyarakat tentang pajak ke arah yang positif. Hal ini telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menyadarkan masyarakat akan wajib pajak.

¹⁰⁹Ibid, *Dispenda Kota Bandar Lampung*

Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pajak daerah, sehingga kesadarannya membayar pajak akan bertambah dan pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah.

“kami rutin melakukan sosialisasi melalui media cetak seperti surat kabar, membuat leaflet/brosur, memasang papan himbauan pajak di tempat-tempat umum untuk mengingatkan masyarakat membayar pajak. Cara lain yang kami buat adalah membuat pojok pajak di setiap kelurahan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat dan Alhamdulillah mendapat respon baik dari masyarakat dengan menyertakan lurah untuk berpartisipasi membantu pelaksanaannya.”¹¹⁰

Gambar 1.2

Surat Kabar Mengenai Pajak dan Sosialisasi Tentang Pajak Daerah



(Sumber: Dinas Pendapatan Daerah, 2016)

- d. Melakukan pendataan ulang agar subjek pajak sesuai dengan keadaan di lapangan

Hal ini dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung supaya data subjek pajak sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Upaya ini dilakukan

¹¹⁰Bpk. Ir.Idul Haji Atmoko, kepala bidang Dispenda Kota Bandar Lampung Senin 17 Juli 2017

agar tidak terjadinya kecurangan masyarakat dan memastikan ada tidaknya perubahan objek pajak. Selain rutin mensosialisasikan dispenda juga perlu melakukan pengawasan di lapangan.

e. Memberikan insentif kepada petugas pemungut pajak

Pemerintah Kota Bandar Lampung juga melakukan upaya dengan memberikan insentif kepada petugas pemungut pajak. Hal ini dilakukan supaya petugas pemungut pajak lebih bersemangat lagi dalam melaksanakan tugasnya. Insentif yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung kepada petugas pemungut pajak adalah sebesar 1% dari target realisasi Pajak Daerah telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung.

“Menurut Bapak Idul Haji Upaya-upaya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung seperti yang telah disebutkan diatas sudah terlaksana dengan baik. Berbagai upaya telah ditempuh oleh pemerintah Kota untuk menyadarkan masyarakat wajib pajak.”¹¹¹

Sehubungan dengan upaya pemerintahan Kota Bandar Lampung dalam menyadarkan wajib pajak seperti yang telah disebutkan diatas, Upaya-upaya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung seperti yang telah disebutkan diatas sudah terlaksana dengan baik. Berbagai upaya telah ditempuh oleh pemerintah Kota Bandar Lampung untuk menyadarkan masyarakat wajib pajak. Dispenda beserta

¹¹¹Bpk. Ir.Idul Haji Atmoko, kepala bidang Dispenda Kota Bandar Lampung Senin 17 Juli 2017

jajarannya harus bekerja keras dalam menggali potensi pajak daerah yang terdapat di daerahnya, petugas harus tegas dalam pemungutan pajak kepada wajib pajak. Intensif juga dilakukan agar mengurangi korupsi.

Seperti yang kita ketahui peran merupakan suatu tindakan yang memberikan kontribusi yang dapat menghasilkan beberapa perubahan, sama seperti peran Dispenda dalam meningkatkan PAD Kota Bandar Lampung, dalam perannya Dispenda sudah optimal dalam upayanya dalam meningkatkan PAD, tetapi petugas dilapangannya perlu dibekali pelatihan-pelatihan melalui pendidikan agar maksimal dalam pemungutannya, serta dibekali ilmu agama agar petugas tidak berlaku curang dan menyetorkan hasil pemungutan pajak daerahnya, dengan melakukan kecurangan dan manipulasi data membuat pemasukan daerah dibidang pajak daerah tidak maksimal dan menyebabkan tidak terealisasinya pendapatan pajak daerah Kota Bandar Lampung.

Seperti yang sudah dipaparkan diatas, Dispenda dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya sudah melakukan dengan segala cara dan sudah maksimal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya khususnya dibidang Pajak daerahnya. Melalui upaya-upaya serta strategi untuk menyadarkan wajib pajak dan cara-cara yang jitu untuk meningkatkan Pendapatan Pajak daerahnya, tetapi hasil dari Pajak daerah tersebut tidak terealisasi dari tahun 2013-2016, yang disebabkan oleh wajib pajak yang tidak jujur dengan memanipulasi data, petugas pajak yang melakukan kecurangan dalam memungut pajak, serta adanya kerjasama antara wajib pajak dan petugas pajak yang melakukan kecurangan-

kecurangan, hal tersebut membuat pajak daerah yang dikelola Dispenda belum optimal bagi pemasukan Pendapatan Asli daerah Kota Bandar Lampung.

B. Peran Dinas Pendapatan Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung dalam Perspektif Ekonomi Islam

Seperti yang kita ketahui bahwa pendapatan asli daerah menurut Ahmad Yani adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹¹² Sedangkan pengertian pendapatan asli daerah menurut Abdul Halim adalah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah Yang Dipisahkan dan lain-lain.¹¹³

Fungsi pendapatan asli daerah menurut A.W. Widjaja merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Pendapatan asli daerah merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas (subsidi).¹¹⁴ yang bertujuan untuk memberikan keleluasan daerah dalam menggali pendapatan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan atas desentralisasi. Pendapatan asli daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, yang nantinya di gunakan untuk pembiayaan pembangunan daerah itu sendiri oleh karena itu pemerintah daerah mengupayakan menggali potensi yang dan untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu

¹¹² *Ibid*, h.51

¹¹³ Abdul Halim, Muhammad Syam Kusufi, *Lok.Cit*, h. 101.

¹¹⁴ A.W. Widjaja, *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, h. 32

melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Dalam firman Allah swt :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S At-Taubah ayat 60)

Sebagai sebuah ajaran hidup yang lengkap Islam memberikan petunjuk atas semua aktivitas manusia, termasuk ekonomi. Oleh karenanya tujuan diturunkannya syari'at Islam, yaitu untuk mencapai *falah* (kesejahteraan/keselamatan) baik dunia maupun akhirat. Untuk mencapai kesejahteraan tersebut tugas pemerintah haruslah dapat menjamin kepentingan sosial masyarakatnya dengan cara memenuhi kepentingan publik untuk rakyatnya.

Nurul Huda menjelaskan dalam konsep Islam, pemenuhan kepentingan sosial merupakan tanggung jawab pemerintah, Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan, memelihara, dan mengoperasikan *Public utilities* (pelayanan publik) untuk menjamin terpenuhinya kepentingan

sosial.¹¹⁵ Dalam pemikiran Islam menurut An-Nabahan dalam Adi, Pemerintah merupakan lembaga formal yang mewujudkan dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada semua rakyatnya. Pemerintah mempunyai segudang kewajiban yang harus dipikul demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya bertanggung jawab terhadap perekonomian.¹¹⁶

Adapun prinsip-prinsip Ekonomi Islam yang wajib diterapkan di Dinas Pendapatan Asli Daerah (Dispenda) antara lain :

1. Bertanggung Jawab

Untuk mewujudkan dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat sebagai tanggung jawab Dinas Pendapatan Asli Daerah (Dispenda) agar menciptakan kesejahteraan, pemerintah memiliki kebijakan yang digunakan untuk mengatur pemerintahannya. Tujuan dari kebijakan fiskal dalam Islam adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pendapatan, ditambah dengan dengan tujuan lain yang terkandung dalam aturan Islam yaitu Islam menetapkan pada tempat yang tinggi akan terwujudnya persamaan dan demokrasi, ekonomi Islam akan dikelola untuk membantu dan mendukung ekonomi masyarakat yang terbelakang.

¹¹⁵ Nurul Huda dkk, *Keuangan Publik Islam: Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, (Jakarta : Kencana, 2012),h. 1

¹¹⁶ Nurul Huda, et al, *Op.Cit*, h. 190

Jadi, Dinas Pendapatan Asli Daerah harus bertanggung jawab atas pendapatan daerah. Dinas pendapatan dari hasil penelitian lapangan sudah bertanggung jawab karena mereka sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui seminar, media cetak, slogan dan dll. Tetapi dari petugas pemungut pajak seringkali tidak bertanggung jawab atas tugasnya karena banyak ditemukan mereka tidak jujur dan bekerja sama dengan wajib pajak untuk melakukan kecurangan.

2. Adl (Keadilan)

Seringkali ditemukan petugas penagih pajak yang tidak jujur atau melakukan kecurangan, dan adanya wajib pajak yang tidak membayar pajak dan juga memanipulasi data mereka. Jadi Dinas pendapatan asli daerah harus bersikap tegas dan memberikan sanksi kepada petugas penagih pajak dan wajib pajak.

3. Berjamaah (Kerjasama)

Dinas Pendapatan Daerah seharusnya bekerja sama dengan petugas pemungut pajak agar terciptanya kemajuan yang lebih baik dan terealisasinya target pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah Yang telah di tentukan.

4. Kejujuran

Kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam, Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Sebab, nilai kebenaran ini akan berdampak langsung kepada

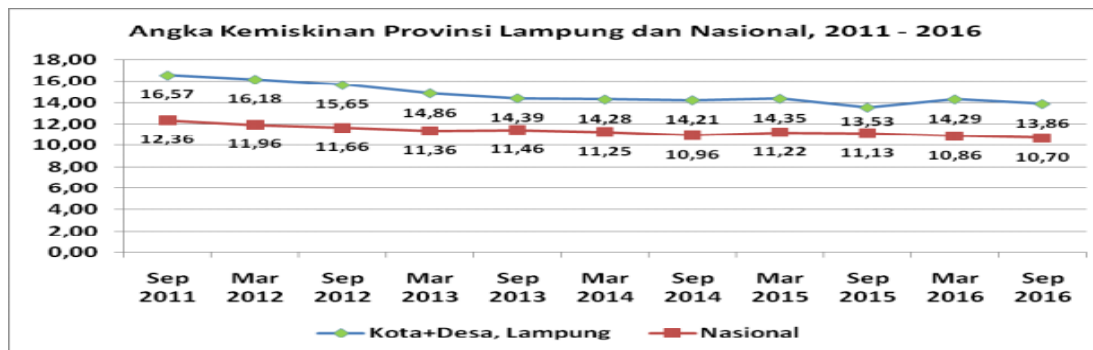
pembangunan yang ada di Bandar Lampung. Maka hasil penelitian di Dinas Pendapatan Asli daerah telah ditemukan adanya ketidak jujuran yang dilakukan oleh petugas penagih pajak dan juga wajib pajak

5. Kemaslahatan

Prinsip ekonomi islam yang ke lima Kemaslahatan jadi mengenai pendapatan asli daerah yang merupakan aset Negara yang diserahkan pengelolaannya kepada perseorangan, para ulama Madzab Hanafiah berpendapatan bahwa pengelolaan tersebut hasilnya harus dimasukan ke Baitul Mal, karena merupakan aset Negara yang bermanfaat bagi masyarakat umum. Dalam Ushul Fiqh terdapat prinsip al-mursalah, yakni kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh sya'I dalam rangka menciptakan kemaslahatan disamping tidak terdapat dalil yang membernarkan dan menyalahkan. Berdasarkan pengertian diatas pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan semata-mata untuk mencari kemaslahatan manusia.

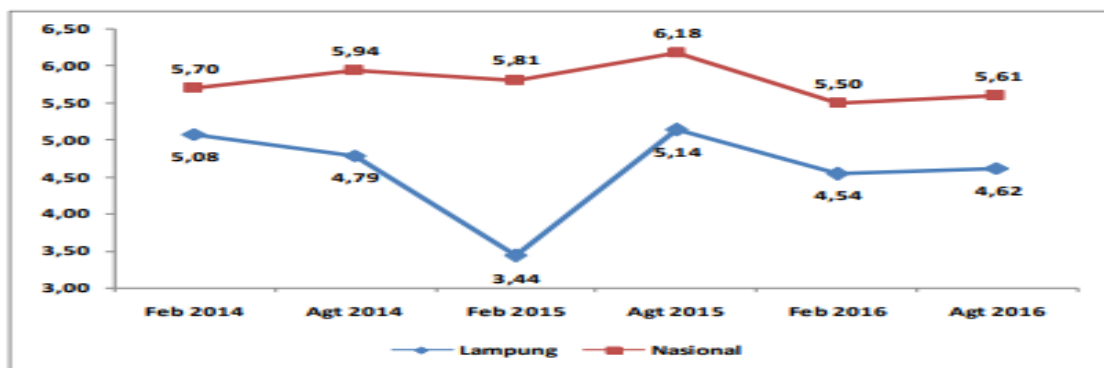
Dapat kita lihat bahwa angka kemiskinan di Provinsi Lampung setiap tahunnya berkurang, dan angka tingkat pengangguran mengalami pengurangan dari tahun 2011 sampai 2016.

Gambar 2.1
Tingkat Angka Kemiskinan Provinsi Lampung dan Nasional
September 2011 - September 2016



Sumber : BPS Provinsi Lampung tahun 2016

Gambar 2.2
Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Lampung dan Nasional
Februari 2014 - Agustus 2016



Sumber : BPS Provinsi Lampung tahun 2016

Jadi dapat disimpulkan bahwa peran Dinas Pendapatan Asli Daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli daerah belum berjalan dengan baik dan belum sesuai dengan ajaran Islam karena belum menggunakan prinsip-prinsip ekonomi islam, dalam Islam hasil dari pendapatan Negara atau daerah haruslah merata dan dirasakan semua lapisan masyarakat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis tentang peran dinas pendapatan daerah (dispenda) dalam meningkatkan pendapatan asli daerah maka penulis menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Target penerimaan pajak daerah tidak pernah terealisasi dari tahun 2013-2016. Disinyalir masih adanya wajib pajak yang menunggak membayar pajak dan melakukan manipulasi, serta ketidakjujuran petugas penagih pajak. Dispenda dalam menyadarkan wajib pajak seperti yang telah disebutkan diatas dan upaya-upaya yang telah ditetapkan belum terlaksana dengan baik karena target belum terealisasi.
2. Peran dispenda dalam meningkatkan PAD ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam belum menggunakan prinsip Islam karena di dalam prinsip ekonomi islam adanya Tanggung Jawab, keadilan, kejujuran, dan kerjasama, di lapangan belum mencerminkan prinsip Islam masih ditemukan ketidakjujuran petugas pajak, tidak bertanggung jawab, dan kurang kerjasama dan adil yang terjadi antara dinas pendapatan daerah dan petugas pemungut pajak. Hanya prinsip kemaslahatan saja yang sudah menggunakan prinsip Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran-saran yang dapat diberikan adalah :

1. Dinas Pendapatan Asli Daerah harus lebih bertindak tegas kepada petugas pemungut Pajak yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik dan wajib pajak yang melanggar.
2. Penulis berharap dengan adanya skripsi ini penulis dapat memberikan ilmu pengetahuan kepada pembaca mengenai pentingnya membayar pajak daerah sebagai pendapatan asli daerah yang memberikan manfaat terhadap daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah dan meningkatkan infrastruktur daerah.
3. Memberikan ilmu pengetahuan bagi pembaca tentang prinsip-prinsip ekonomi islam seperti bertanggung jawab, adil, bekerja sama, kejujuran dan kemaslahatan, agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya dibidang Pajak Daerahnya. Dispenda harus lebih tegas kepada wajib pajak apabila mereka melanggar aturan, dan juga lebih membina petugas-petugas pemungut pajak agar dibekali kejujuran dan nilai agama. Serta harus memberikan pembinaan dan recruitment karyawan dalam Dispenda serta petugas pajak harus sesuai dengan koridor dan kompetensinya agar mencapai target PAD berjalan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qodim Zallum. 2002. *system keuangan di Negara islam*. Pustaka Jakarta.
- Adisasmita, Rhardjo. 2011. *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Agus, Hendra . 2005. *Sulitnya mendefinisikan pajak*, Opini berita pajak.
- Ali, Zainuddin .2007.*PENDIDIKAN AGAMA ISLAM*. Ed,1 : Bumi Aksara. Jakarta.
- Arsyad, Lincolin.2010.*Ekonomi Pembangunan Edisi Kelima*. UUP STIM YKPN. Yogyakarta.
- A.W. Widjaja. 2002. *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Chamid, Nur. 2010. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Drs. Darwin, MBP. 2010. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Gusfahmi. 2007. *Pajak Menurut Syariat* .Rajawali Pers.
- H. Moh. Pabundo Tika. 2006. *Metodelogi Riset Bisnis*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Huda, Nurul. 2015. *Ekonomi Pembangunan Islam cetakan ke-1*. Kencana. Jakarta.
- Jusuf, Soewadji . 2012. *Pengantar Metodelogi Penelitian*. Mitra Wacana Media.Jakarta.
- Mahjuddin .2003. *Masailul Fiqhiyah: Berbagai Kasus yang Dihadapi “Hukum Islam” Masa Kini*. Kalam Mulia. Jakarta.
- Sabarno, Hari.2007. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa,.* Sinar Grafika. Jakarta.
- Samudra, Azhari. 2015. *Perpajakan Di Indonesia*. Rajawali Press. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Edisi Baru . Rajawali Pers. Jakarta.
- Simanjuntak. 2002. *Manajemen Keuangan Publik*, Erlangga. Jakarta.
- Sudarsono, Heri. 2002. *Konsep Ekonomi Islam*. Ekonosia. Ekonisia. Yogyakarta.

- Sugioyo, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Alfabeta. Bandung .
- Suprayitno, Eko. 2005. *Ekonomi Islam : Pendekatan Ekonomi Makro Islam Dan Konvensional*, Graha Ilmu. Yogyakarta .
- Sutrisno, Hadi .2002. *Metode Research*. UGM. Yogyakarta.
- Umar, Husen. 2009. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Yani, Ahmad. 2013. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia*. PT.Raja grafindo. Jakarta .
- Yuliati. 2000. *Akuntansi Sektor Publik Cetakan Kelima*. Salemba Empat . Jakarta.
- Zariah, Nurul. 2007. *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Bumi Aksara. Jakarta.

